

No. Katalog: 4102004.6304

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO KUALA**

INDIKATOR

KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2021



**Judul Buku: INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
 KABUPATEN BARITO KUALA
 TAHUN 2021**

No. Publikasi : 63040.1926
ISBN : 978-623-6799-10-9
Katalog BPS : 4102004.6304
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xviii + 101 Halaman

Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito
 Kuala

Editor : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
 Kabupaten Barito Kuala

Gambar Kulit : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
 Kabupaten Barito Kuala

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito
 Kuala

Dicetak Oleh : CV. Karya Bintang Musim

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT kami panjatkan mengiringi terbitnya Publikasi "**Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021**". Publikasi ini merupakan publikasi yang menyajikan data indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Barito Kuala beserta analisisnya.

Publikasi ini menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Barito Kuala antar waktu dan perbandingannya antar wilayah. Aspek yang disajikan adalah aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Aspek tersebut antara lain Kependudukan dan fertilitas, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, serta pola konsumsi dan kemiskinan. Sumber data pokok yang digunakan adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Ketenagakerjaan Nasional (SAKERNAS), dan data dari berbagai sumber lain yang menunjang.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini diharapkan dapat berguna bagi para perencana pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pengawasan serta bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan publikasi dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Akhirnya, semoga penerbitan publikasi ini mendapatkan rahmat dari Allah SWT, dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Marabahan, 20 Desember 2020

**Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO KUALA,**



Najwa Dauli,

NIP. 197909232000121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
KONSEP DAN DEFINISI.....	x
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan	5
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Sumber Data	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
DEMOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN	11
2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	12
2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	13
2.3 Struktur dan Komposisi Penduduk	20
KESEHATAN	29
3.1 Derajat Kesehatan Masyarakat	30
3.2 Kesehatan Balita	32
PENDIDIKAN	43
4.1 Angka Melek Huruf	44
4.2 Rata-rata Lama Sekolah.....	47

4.3	Tingkat Pendidikan.....	48
4.4	Tingkat Partisipasi.....	50
KETENAGAKERJAAN		57
5.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	58
5.2	Daya Serap Tenaga Kerja	63
5.3	Produktivitas Pekerja	65
5.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	70
PERUMAHAN		75
6.1	Penguasaan Tempat Tinggal.....	77
6.2	Fasilitas Tempat Tinggal	78
POLA KONSUMSI DAN KEMISKINAN.....		87
7.1	Pola Konsumsi.....	87
7.2	Distribusi Pendapatan	92
7.3	Kemiskinan	96

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 dan 2020 (Jiwa)	13
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 (Jiwa).....	15
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan <i>Sex Ratio</i> Per kelompok Umur di Kabupaten Barito Kuala, 2020	21
Tabel 2.4	Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020	25
Tabel 3.1	Angka Morbiditas dan Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan di Kabupaten Barito Kuala Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2020	31
Tabel 3.2	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dua Tahun Terakhir Menurut Kelompok Pengeluaran dan Berat Badan Bayi yang Dilahirkan Terakhir, 2020	38
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.....	49
Tabel 4.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Penduduk Berumur 7 s.d. 18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020	51
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2020	53
Tabel 5.1	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat	

	Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020	59
Tabel 5.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Kuala, Agustus 2020	63
Tabel 5.3	Persentase penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Kuala, 2020	65
Tabel 5.4	Persentase Pengangguran, Setengah Pengangguran, Pekerja Paruh Waktu dan Pekerja Penuh Waktu Kabupaten Barito Kuala, Agustus 2020	69
Tabel 7.1	Pengeluaran Makanan Per kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 s.d. 2020 90	
Tabel 7.2	Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 s.d. 2020.....	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Persentase Sebaran Penduduk Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Kecamatan Tahun 202017
Gambar 2.2	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Barito Kuala per Kecamatan Tahun 2020.....18
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Kabupaten Barito Kuala, 202022
Gambar 2.4	Komposisi Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 202024
Gambar 3.1	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama, 202033
Gambar 3.2	Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Umur Saat Hamil Pertama, 202034
Gambar 3.3	Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan, 202036
Gambar 3.4	Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Tempat Melahirkan, 2020.....37
Gambar 3.5	Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Barito Kuala Tahun 202040
Gambar 4.1	Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.....46
Gambar 4.2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Usia 25 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 202048

Gambar 5.1	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Barito Kuala, 2020.....	61
Gambar 5.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala, 2020	62
Gambar 5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala, 2020	71
Gambar 5.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Barito Kuala, 2020	72
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Kuala, 2020.....	77
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Barito Kuala, 2020.....	79
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Barito Kuala, 2020	81
Gambar 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan di Kabupaten Barito Kuala, 2020.....	83
Gambar 7.1	Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 s.d. 2020	89
Gambar 7.2	Garis Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala, 2010-2020	98
Gambar 7.3	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 s.d. 2020	99
Gambar 7.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2002 s.d. 2020	100
Gambar 7.5	Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 s.d. 2020	101

KONSEP DAN DEFINISI

Kependudukan

- **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografi RI selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
- **Kepadatan Penduduk** adalah banyaknya penduduk per satuan wilayah dalam kilometer persegi.
- **Rata-rata Pertumbuhan Penduduk** adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.
- **Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)** adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.
- **Rumah Tangga** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama atau makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.
- **Umur Median** digunakan untuk melihat struktur penduduk suatu wilayah, apakah relative "Tua atau Muda". Ditafsirkan sebagai umur yang membagi tepat penduduk menjadi dua bagian, yaitu di atas atau di bawah umur tersebut.
- **Rasio Ketergantungan** menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan usia tua (65 tahun atau lebih).

Kesehatan

- **Angka Kesakitan/Morbiditas** adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan sakit dan terganggu akibat keluhan tersebut.
- **Angka kontak** pada fasilitas pelayanan kesehatan digambarkan sebagai persentase penduduk yang pernah berobat jalan dari seluruh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan selama satu bulan terakhir.
- **Asi Eksklusif (*Exclusively Breastfeeding*)** menggambarkan tingkat kesadaran orang tua terhadap pemberian ASI yang benar, merupakan persentase balita yang diberi ASI tanpa makanan tambahan.

Fertilitas dan KB

- **Pasangan Usia Subur (PUS)** adalah pasangan suami istri yang pada saat ini hidup bersama, baik bertempat tinggal resmi dalam satu rumah ataupun tidak, dimana umur istrinya antar 15-49 tahun.
- **Rata-rata Umur Perkawinan Pertama (*Singulate Mean Age of Marriage = SMAM*)** adalah rata-rata seorang wanita pada saat melaksanakan perkawinan pertama kali.
- **Partisipasi KB** adalah proporsi peserta keluarga berencana (KB) aktif terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS).
- **Kontap** merupakan alat/cara KB yang bersifat permanen/mantap, meliputi : MOW, MOP, AKDR/IUD, dan Susuk/Implant.

Pendidikan

- **Angka Partisipasi Kasar (APK)** menggambarkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan pendidikan tersebut.
- **Angka Partisipasi Murni (APM)** merupakan persentase jumlah anak yang sekolah di suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah anak pada kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
- **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** menggambarkan proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi sekolah memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.
- **Angka Putus Sekolah (APts)** menunjukkan tingkat kegagalan sistem pendidikan menurut jenjangnya. Perbandingan antara penduduk dalam kelompok umur tertentu yang putus sekolah di jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok umur tersebut yang sedang sekolah pada jenjang tersebut.

Perumahan

- **Luas Lantai:** Luas Lantai yang ditempati dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebatas atap.
- **Fasilitas Air Minum:** Instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau non PAM/PDAM termasuk sumur gali dan sumur pompa.
- **Air Bersih** adalah air yang bersumber dari: air minum kemasan, air ledeng, sumur bor, sumur terlindung, atau mata air terlindung. Khusus untuk air minum yang bersumber dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi jarak ≥ 10 meter dari penampungan akhir tinja terdekat.

- **Air Minum Layak** adalah air minum yang bersumber dari: air ledeng, sumur bor/pompa, air hujan, sumur terlindung, atau mata air terlindung. Khusus untuk yang bersumber dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi jarak ≥ 10 meter dari penampungan akhir tinja terdekat.
- **Sanitasi Layak** adalah fasilitas buang air besar sendiri atau bersama dengan jenis kloset leher angsa dan tangki septik sebagai tempat akhir pembuangan kotoran.
- **Penerangan Listrik** adalah sumber penerangan yang berasal dari listrik PLN dengan meteran atau tanpa meteran listrik maupun listrik non PLN (listrik tenaga surya, generator).

Ketenagakerjaan

- **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun keatas.
- **Penduduk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja dengan kegiatan:
 - Bekerja, atau
 - Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, atau
 - Pengangguran.
- **Penduduk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja dengan kegiatan:
 - Bersekolah, atau
 - Mengurus rumahtangga atau
 - Melaksanakan kegiatan lainnya.
- **Bekerja** adalah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, selama paling sedikit 1 jam berturut-turut dalam satu

minggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

- **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Tidak termasuk mereka yang sedang libur sekolah.
- **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang dalam mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah. Misalnya ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya, pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah meskipun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
- **Kegiatan lainnya** adalah kegiatan seseorang selain bekerja, sekolah dan mengurus rumah tangga termasuk didalamnya mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan seperti orang lanjut usia, cacat jasmani (buta, bisu, dan sejenisnya) dan penerima pendapatan atau pensiun yang tidak bekerja lagi selama seminggu yang lalu.
- **Pengangguran** adalah penduduk yang pada periode survei tidak bekerja dengan kegiatan:
 - Sedang mencari pekerjaan, atau
 - Sedang mempersiapkan usaha, atau
 - Penduduk yang tidak mencari pekerjaan, karena alasan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau
 - Sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15+).
- **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah rasio antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

- **Pekerja tidak penuh** adalah mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), terdiri dari:
 - **Setengah pengangguran** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa)
 - **Pekerja paruh waktu** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela)
- **Lapangan usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.
- **Sektor Pertanian (*Agriculture*)** meliputi subsektor pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura, kehutanan, perburuan, subsektor peternakan dan perikanan.
- **Sektor Industri (*Manufacture*)** meliputi subsektor Pertambangan dan Pengalihan, Industri, Listrik dan Air Bersih, Bangunan
- **Sektor Jasa (*Services*)** meliputi subsektor Perdagangan, Rumah Makan, Angkutan, Keuangan, dan Jasa-jasa.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesejahteraan Rakyat di suatu daerah dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah Demografi dan Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Perumahan, Pola Konsumsi dan Kemiskinan. Indikator yang dilihat pada pembahasan Demografi dan Kependudukan diantaranya adalah jumlah penduduk dan perkembangan (tren) penambahan penduduk. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Barito Kuala disajikan berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, yaitu 313.021 jiwa dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 103. Dilihat dari struktur penduduk yang tercermin dari piramida penduduk, Kabupaten Barito Kuala masih termasuk piramida penduduk muda (*expensive*) ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda dan sedang mengalami pertumbuhan dengan tingkat kelahiran dan kematian yang relatif tinggi.

Indikator yang mewakili kesehatan salah satunya adalah angka morbiditas (kesakitan) yang menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan aktivitas sehari-harinya terganggu akibat keluhan tersebut. Pada tahun 2020, angka kesakitan Barito Kuala sebesar 14,01 persen. Sementara itu, kesehatan Ibu dan Balita juga menjadi bagian dari indikator kesehatan. Sebesar 73,92 persen penduduk pernah kawin telah melahirkan di fasilitas kesehatan. Lebih lanjut, 61,69 persen balita di Barito Kuala sudah mendapatkan imunisasi lengkap di tahun 2020.

Kesejahteraan masyarakat dari sisi pendidikan dapat dilihat diantaranya melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). RLS Barito Kuala tahun 2020 sebesar 6,73 persen. Artinya, penduduk usia 25 tahun ke atas yang tinggal di Kabupaten Barito Kuala menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 (satu) SMP saja atau putus sekolah dikelas 2 (dua) SMP. Sementara itu, APS Barito Kuala untuk usia 7-12; 13-15; dan 16-18 tahun masing-masing sebesar 98,94; 97,55; dan 74,17 persen. Lebih lanjut, APM Barito Kuala

sebesar 98,68 untuk usia SD, 75,84 untuk usia SMP, dan 61,73 untuk usia SMA.

Dari sisi ketenagakerjaan, penduduk dilihat berdasarkan jenis kegiatan utamanya untuk memperoleh persentase penduduk bekerja. Pada tahun 2020, proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang berstatus bekerja sebesar 72,42 persen. Dengan kata lain, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, terdapat sebanyak 72 s.d. 73 penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi atau masuk dalam dunia kerja. Sektor lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian dengan sumbangan sebesar 51,65 persen. Jika diamati berdasarkan jenis pekerjaannya, pada tahun 2020 diantara penduduk Barito Kuala yang bekerja, terdapat 29,13 persen penduduk bekerja di sektor formal dan selebihnya 70,87 persen bekerja di sektor informal. Lebih lanjut, nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Kuala sebesar 2,93 persen. Artinya bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja terdapat sekitar 3 orang diantaranya adalah pengangguran.

Berdasarkan hasil Susenas 2020 Kabupaten Barito Kuala, secara umum sebagian besar rumah tangga sudah tinggal di rumah milik sendiri yaitu sekitar 85,88 persen, sedangkan sisanya sebesar 14,12 persen masih bertempat tinggal di rumah sewa/kontrak, rumah dinas, dsb. Sementara itu, persentase rumah tangga menurut sumber air minum didominasi oleh mereka yang mengonsumsi Air Permukaan/Air Hujan/Lainnya, sebesar 63,03 persen. Ditinjau dari sumber penerangan utama, mayoritas rumah tangga di Barito Kuala telah menggunakan penerangan listrik yang bersumber dari PLN yaitu sebesar 98,06 persen.

Indikator kemiskinan ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Pada tahun 2020 diperoleh angka P0, P1, dan P2 berturut-turut sebesar 5,11; 0,81 dan 0,21. Angka tersebut dihitung berdasarkan Garis Kemiskinan sebesar Rp. 340.526. Sementara itu, Indeks Gini yang mencerminkan pendapatan penduduk, pada tahun 2020 sebesar 0,28.

<https://baritokualakab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai Negara (Pemerintah) dan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep kemakmuran rakyat ini kemudian dijabarkan oleh Pemerintah melalui berbagai macam program pembangunan sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek/Panjang (RPJM). Pembangunan didefinisikan sebagai suatu perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau manusiawi. Pembangunan ekonomi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dijabarkan dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diyakini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan indikator naiknya angka Produk Domestik Bruto (PDB) riil perkapita.

Pada kenyataannya, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta mengatasi masalah sosial ekonomi seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Berpijak dari hal tersebut, konsep pembangunan ekonomi perlu didefinisikan ulang (*redefined*). Tujuan pembangunan ekonomi bukan lagi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, melainkan bertujuan menghapus atau mengurangi penduduk miskin, menanggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja (Todaro, 2000).

Sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang telah didefinisikan ulang tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dengan menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Wujud realisasi dari kebijakan tersebut di antaranya Program Wajib Belajar 9 Tahun, Program KB, intervensi/perlindungan daya beli masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin melalui program bantuan dan perlindungan sosial—Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jamkesmas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan untuk penyandang cacat dan lansia, dll—program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Program-program yang diyakini sangat pro rakyat tersebut diharapkan dapat melindungi kinerja perekonomian untuk tetap mampu menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas SDM, dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Upaya pemerintah meningkatkan pembangunan di semua bidang memerlukan perencanaan yang cermat dan terarah, yang harus didukung oleh tersedianya data dan informasi yang lengkap tentang sejauh mana capaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Tanpa adanya dukungan data penting tersebut, para penentu kebijakan dan pembuat keputusan kemungkinan akan membuat kekeliruan dalam menentukan target, kebijakan, dan membuat program yang tidak cocok untuk kelompok masyarakat yang menjadi sasarannya.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan itu diperlukan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Salah satu informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan adalah indikator sosial ekonomi yang diharapkan dapat menggambarkan fenomena sosial dan ekonomi yang

terjadi dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan taraf hidup, pemerataan pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat.

Indikator kesejahteraan rakyat sangat diperlukan oleh para perencana, penentu kebijakan dan pengambil keputusan untuk: 1) menilai hasil dan distribusi kesejahteraan masyarakat; 2) memantau dampak sosial dari kebijaksanaan pembangunan; 3) untuk mengukur kondisi, keadaan, dan *trend* kesejahteraan penduduk serta untuk memantau perkembangannya sepanjang waktu; dan 4) untuk memantau kondisi dari kelompok penduduk pada lapisan masyarakat tertentu yang mungkin masih memerlukan perhatian dan bantuan khusus.

Di Indonesia, data tentang karakteristik sosial masyarakat dikumpulkan melalui berbagai cara seperti Sensus Penduduk, Survei Penduduk antar Sensus (Supas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dari beberapa jenis sensus/survei tersebut diatas, Susenas merupakan survei dengan cakupan data sosial kependudukan paling lengkap. Dari data yang dihasilkan, dapat disusun berbagai indikator sosial atau indikator kesejahteraan masyarakat seperti indikator di bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas dan keluarga berencana, partisipasi ekonomi/ketenagakerjaan, kondisi dan fasilitas perumahan, konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, kemiskinan dan sebagainya.

1.2 Tujuan

Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat (*visible*) jika dilihat dari suatu aspek tertentu. Oleh karena itu, publikasi ini hanya menyajikan permasalahan kesejahteraan rakyat yang dapat diamati dan dapat diukur (*measurable welfare*) dengan menggunakan berbagai indikator sosial, antara lain; Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB), Kesehatan, Pendidikan, Perumahan, dan

Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Konsumsi/pengeluaran, dan indikator kesejahteraan lainnya.

Penerbitan publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi serta dinamika sosial ekonomi kehidupan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Lebih khusus lagi melihat tingkat kesejahteraan rakyat, sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan. Dari gambaran tersebut diharapkan diperoleh hal-hal yang bermanfaat guna mengantisipasi berbagai kendala atau hambatan sehingga dapat disusun perencanaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Barito Kuala.

Indikator ini juga sangat penting bagi para perencana pembangunan dan pengambil kebijakan daerah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan telah dicapai. Apalagi sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2000, dimana kabupaten/kota memiliki kebijakan dan kewenangan yang lebih besar untuk menjalankan roda pembangunan, sehingga daerah mempunyai peran sangat penting dalam menyiapkan dan meningkatkan sumber daya yang dimilikinya.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bahasan dalam penulisan indikator kesejahteraan rakyat ini akan dibatasi untuk wilayah administrasi Kabupaten Barito Kuala. Karena keterbatasan jumlah sampel rumah tangga Susenas, maka data yang disajikan tidak seluruhnya bisa menampilkan angka sampai tingkat kecamatan.

1.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk data jumlah dan komposisi penduduk diperoleh dari proyeksi penduduk;

2. Untuk materi kesehatan, pendidikan, fertilitas, perumahan, konsumsi/ pengeluaran serta kemiskinan diperoleh dari Susenas 2020;
3. Untuk materi ketenagakerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020.
4. Serta sumber data lainnya yang menunjang analisis baik dari sensus/survei BPS maupun data dari instansi terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, Sumber Data, serta Sistematika Penyajian
- Bab II menyajikan tentang Demografi dan Kependudukan
- Bab III menyajikan tentang Kesehatan
- Bab IV menyajikan tentang Pendidikan
- Bab V menyajikan tentang Ketenagakerjaan
- Bab VI menyajikan tentang Perumahan
- Bab VII menyajikan tentang Pola Konsumsi dan Kemiskinan
- Bab VIII Menyajikan Kesimpulan

<https://baritokualakab.bps.go.id>

BAB II

DEMOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah modal dasar yang paling penting dalam pembangunan. Ibarat pisau bermata dua, penduduk yang besar dapat menjadi modal dasar pembangunan yang sangat potensial, namun di sisi lain keberadaan jumlah penduduk yang besar dapat merupakan beban bagi pembangunan. Penduduk merupakan faktor yang dominan dalam pelaksanaan pembangunan, karena penduduk bukan saja merupakan pelaksana (subjek) melainkan juga sebagai sasaran akhir (objek) dari proses pembangunan. Penduduk yang besar akan menjadi potensi jika tersebar merata, berpendidikan, sehat, berdaya saing dan berbudaya. Kondisi sebaliknya terjadi jika penduduk yang banyak hanya menggerombol di suatu wilayah saja, berpendidikan rendah, sakit-sakitan, berdaya saing rendah dan rawan konflik sosial. Oleh karena itu, guna menunjang keberhasilan pembangunan, fokus perhatian pemerintah terhadap masalah kependudukan sebaiknya tidak hanya mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk saja, melainkan juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing.

Dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan, perkembangan bidang kependudukan perlu diarahkan sehingga memiliki karakteristik yang dapat menunjang dan menguntungkan pembangunan. perkembangan kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas, perkembangan kualitas, serta pengarahannya terhadap mobilitas penduduk, sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan. Tujuan dari perkembangan kependudukan, yaitu untuk mewujudkan keserasian, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk, dengan lingkungan hidup.

Berbicara masalah kependudukan tidak terlepas dari jumlah dan laju pertumbuhan, komposisi serta sebaran penduduk. Suatu analisis kependudukan menjadi penting, mengingat sifat profil penduduk yang selalu mengalami perubahan sejalan dengan perjalanan waktu. Perubahan tersebut terjadi karena perubahan komponen penduduk, yaitu; kelahiran, kematian, dan migrasi. Dengan tersedianya data kependudukan, maka memungkinkan untuk dilakukan suatu analisis mengenai keadaan kependudukan di suatu daerah. Dengan demikian, perubahan penduduk yang terjadi antar waktu akan dapat diketahui dengan mudah.

2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pada satu sisi, penduduk dapat menjadi modal besar bagi pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk bisa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini terjadi jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti, pangan, sandang, papan, akses pendidikan serta kesehatan yang layak. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan harus tercukupi agar tidak terjadi kasus busung lapar yang dapat meningkatkan risiko kematian penduduk. Penambahan jumlah penduduk juga harus searah dengan ketersediaan pemukiman yang layak agar tidak memunculkan pemukiman-pemukiman liar dan kumuh. Selain itu, sarana kesehatan dan pendidikan serta tenaga penunjangnya pun harus tersedia seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2020, telah dilaksanakan Sensus Penduduk yang menghasilkan angka jumlah penduduk hasil sensus. Jumlah penduduk Barito Kuala yang tercatat berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 sebesar 313.021 jiwa. Jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 yang jumlahnya 276.147 jiwa, dapat

dikatakan bahwa dalam periode 10 tahun, jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 13,35 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk antar sensus di Kalimantan Selatan secara total selama periode 2010-2020 yang nilainya sebesar 11,83 persen, nilai pertumbuhan penduduk di Barito Kuala lebih besar. Artinya, penambahan jumlah penduduk Barito Kuala selama periode tersebut relatif lebih cepat dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 dan 2020 (Jiwa)

Jenis Kelamin	2010	2020
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	138 357	158 593
Perempuan	137 790	154 428
Total	276 147	313 021

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan data pada Tabel 2.1, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 sebanyak 313.021 jiwa, yang terdiri dari 158.593 laki-laki dan 154.428 perempuan. Jika diamati berdasarkan kelompok jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan selama satu dekade terakhir. Proporsi laki-laki yang lebih tinggi ini yang menjadikan nilai *sex ratio* di Barito Kuala selalu bernilai lebih dari 100. Pada tahun 2020, *sex ratio* di Kabupaten Barito Kuala adalah 102,69. Artinya, jika terdapat 100 penduduk perempuan, maka akan terdapat sejumlah 102 s.d. 103 penduduk laki-laki. Jika dibandingkan dengan *sex ratio* pada tahun 2010 yang sebesar 100,41, maka dapat dikatakan bahwa selama 10 tahun periode antar sensus, penambahan jumlah penduduk laki-laki lebih cepat dibandingkan perempuan.

2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Pada prinsipnya, penduduk akan tinggal di suatu wilayah yang dapat memberikan suatu kehidupan yang layak termasuk kemudahan mendapatkan sandang dan pangan. Persebaran penduduk yang merata antar wilayah secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan antarwilayah tersebut hampir mirip. Preferensi penduduk yang lebih memilih tinggal di suatu wilayah dengan segala fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dibandingkan dengan wilayah yang minim akses akan memunculkan masalah. Masalah tersebut adalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan ini terlihat jelas antara wilayah Jawa dan Luar Jawa, atau Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Demikian halnya dengan distribusi penduduk di wilayah pedesaan dan perkotaan.

Distribusi penduduk yang tidak merata akan menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Wilayah dengan penduduk besar akan dihadapkan dengan berbagai masalah sosial seperti pengangguran. Masalah tersebut terjadi akibat tidak memadainya lapangan pekerjaan yang tersedia karena terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terlalu banyak. Minimnya ketersediaan lahan pemukiman juga dapat menimbulkan pemukiman kumuh. Lebih lanjut, masalah yang mungkin dapat ditimbulkan dari ketidakmerataan distribusi penduduk adalah kurang memadainya akses ke sarana pendidikan dan kesehatan, rawan konflik sosial, dan masalah sosial lainnya. Di sisi lain, wilayah dengan penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, meskipun sebenarnya wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Imbasnya, kemajuan perekonomian di wilayah tersebut biasanya cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah lain dengan SDM yang lebih unggul. Penduduk Kabupaten Barito Kuala tersebar di 17 (tujuh belas) wilayah

administrasi kecamatan dan 201 wilayah desa/kelurahan dengan luas wilayah sebesar 2.996,46 km².

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 (Jiwa)

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen	10 209	9 836	20 045	104
Tamban	16 269	15 698	31 967	104
Mekarsari	9 062	8 735	17 797	104
Anjir Pasar	8 525	8 488	17 013	100
Anjir Muara	11 020	10 898	21 918	101
Alalak	31 872	30 961	62 833	103
Mandastana	8 809	8 688	17 497	101
Jejangkit	3 397	3 209	6 606	106
Belawang	6 934	6 693	13 627	104
Wanaraya	7 326	7 016	14 342	104
Barambai	7 901	7 771	15 672	102
Rantau Badauh	8 296	8 168	16 464	102
Cerbon	5 147	4 822	9 969	107
Bakumpai	5 450	5 087	10 537	107
Marabahan	10 910	11 005	21 915	99
Tabukan	4 541	4 489	9 030	101
Kuripan	2 925	2 864	5 789	102
BARITO KUALA	158 593	154 428	313 021	103

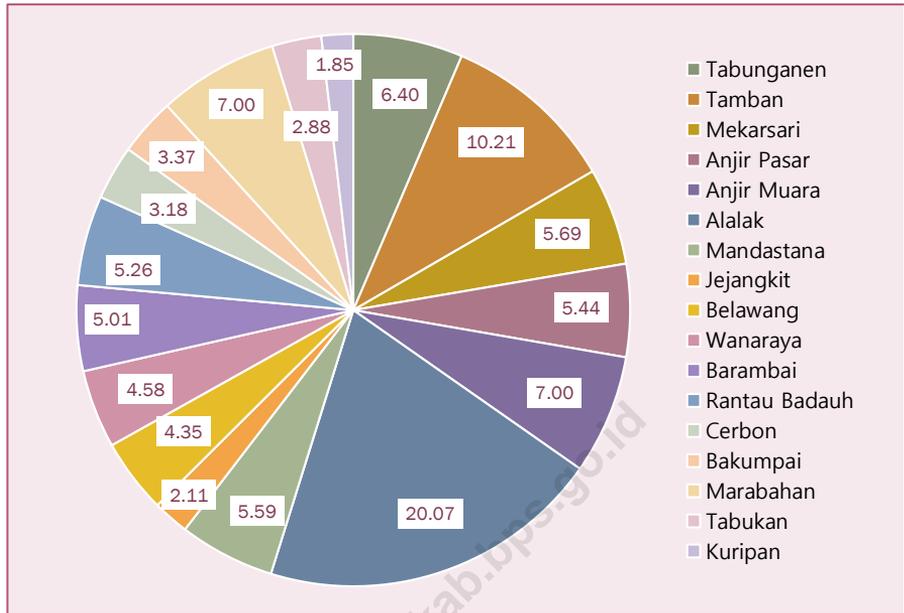
Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan Tabel 2.2., wilayah administrasi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 adalah Kecamatan Alalak, yaitu dengan jumlah total sebesar 62.833 jiwa. Pada posisi kedua yaitu Kecamatan Tamban, wilayah ini dihuni oleh 31.967 penduduk. Selanjutnya, Kecamatan Anjir Muara menjadi wilayah terbesar ketiga yang jumlah penduduk sebesar 21.918 jiwa,

sedikit lebih banyak dibandingkan Kecamatan Marabahan yang berpopulasi sebanyak 21.915 jiwa. Sementara itu, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jejangkit dan Kuripan dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 6.606 dan 5.789 jiwa.

Jika dilihat berdasarkan kelompok jenis kelamin, penduduk di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala juga didominasi oleh penduduk laki-laki yang ditunjukkan dengan nilai rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang lebih dari 100. Terdapat sebanyak 15 dari 17 Kabupaten yang memiliki nilai *sex ratio* lebih dari 100. Kecamatan Anjir Muara memiliki nilai *sex ratio* sebesar 100, artinya secara umum, perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di wilayah tersebut sama. Sementara itu, nilai *sex ratio* sebesar 99 di Kecamatan Marabahan menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih mendominasi di wilayah ini. Dengan kata lain, jika terdapat 100 penduduk perempuan di wilayah ini, maka hanya terdapat 99 penduduk laki-laki.

Dilihat dari komposisinya, persebaran penduduk Kabupaten Barito Kuala terpusat pada beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Alalak, Tamban, Anjir Muara, Tabunganen, dan Marabahan. Kecamatan Alalak menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, sekitar seperlima jumlah penduduk Barito Kuala berada di wilayah ini. Selain itu, Kecamatan Tamban juga memiliki persentase yang cukup besar, yaitu 10,21 persen dari total penduduk di Kabupaten Barito Kuala. Diikuti oleh Kecamatan Marabahan dan Anjir Muara dengan proporsi masing-masing sebesar 7 persen dari total penduduk. Sementara itu, Kecamatan Jejangkit dan Kuripan yang menjadi dua wilayah dengan jumlah penduduk terkecil menyumbang masing-masing sebesar 2,11 dan 1,85 persen. Grafik berikut akan menyajikan persentase jumlah penduduk di semua wilayah Kecamatan di Barito Kuala berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020.



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020

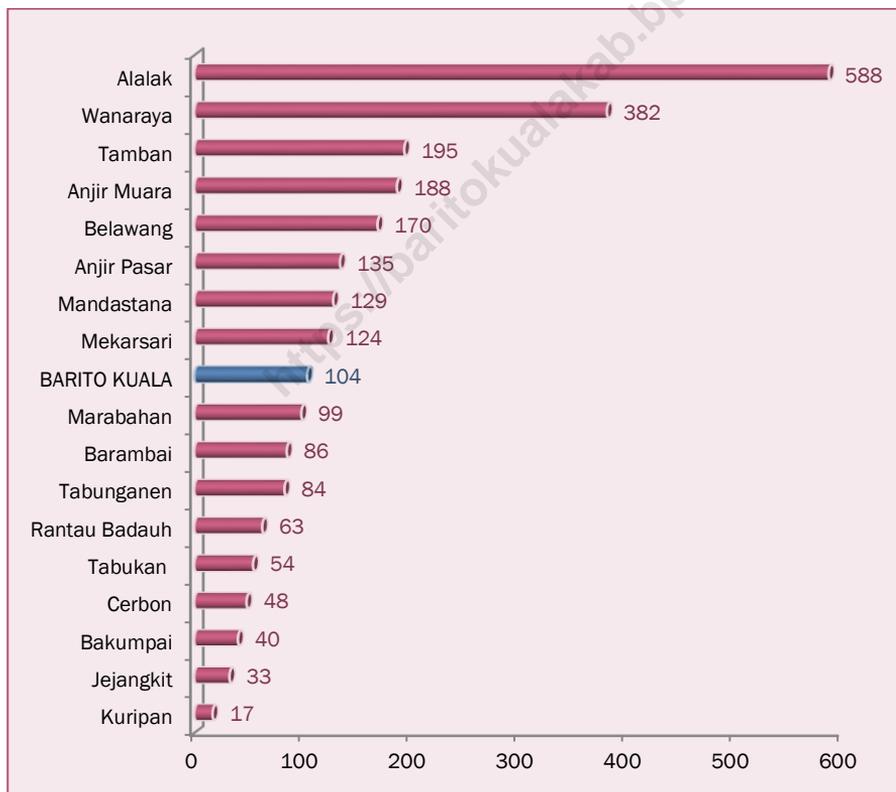
Gambar 2.1 Persentase Sebaran Penduduk Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

Alasan beberapa wilayah administrasi seperti Alalak, Tamban, dan Anjir Muara memiliki populasi penduduk yang cukup besar adalah selain wilayahnya yang cukup luas, letak geografis dari wilayah-wilayah tersebut juga relatif lebih dekat bahkan berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin dibandingkan kecamatan lain. Selain itu, akses menuju Provinsi Kalimantan Tengah dari Kota Banjarmasin juga melewati wilayah-wilayah seperti Alalak dan Anjir Muara. Hal lain yang juga menjadi faktor pendukung banyaknya populasi, khususnya di Kecamatan Alalak adalah semakin menjamurnya perumahan baru yang dibangun di wilayah ini. Tidak sedikit penduduk wilayah lain lebih memilih untuk tinggal di Kecamatan Alalak karena alasan kedekatan dengan pusat kota tersebut.

Adapun Kecamatan Marabahan yang juga memiliki populasi cukup besar, merupakan Ibukota dari Kabupaten Barito Kuala yang terdapat pusat perekonomian dan pemerintahan di dalamnya.

Sehingga merupakan suatu hal yang wajar pula apabila wilayah ini memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Berdasarkan analisis diatas, dapat dikatakan bahwa persebaran penduduk di Barito Kuala masih belum merata. Hal tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung terhadap lingkungan.

Dengan luas wilayah sebesar 2.996,46 km dan jumlah penduduk total sebanyak 313.021 jiwa, kepadatan penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 sebesar 104 yang berarti bahwa setiap satu kilometer persegi wilayah dihuni oleh sekitar 104 penduduk. Grafik berikut akan memberikan gambaran kepadatan penduduk per wilayah Kecamatan.



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 2.2 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Barito Kuala per Kecamatan Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 2.3, dapat dilihat bahwa selain menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, Kecamatan Alalak juga merupakan wilayah yang memiliki nilai kepadatan penduduk tertinggi dengan nilai 588. Artinya, pada tahun 2020 terdapat sekitar 588 jiwa yang tinggal di Kecamatan Alalak per satu kilometer persegi. Letak kecamatan Alalak yang strategis, yaitu yang berbatasan dengan Kota Banjarmasin, menjadikan wilayah ini memiliki perkembangan yang jauh lebih pesat dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Barito Kuala. Lebih lanjut, akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan yang cukup memadai menjadikan kecamatan ini menjadi pilihan untuk tempat tinggal dan menetap. Bahkan Kecamatan Alalak bisa dianggap menjadi wilayah penyangga untuk Kota Banjarmasin karena banyak penduduk yang setiap hari menjadi komuter untuk bekerja ataupun sekolah disana. Selanjutnya, wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi kedua adalah Kecamatan Wanaraya. Meskipun secara jumlah wilayah ini tidak terlalu banyak dibandingkan kecamatan lain, ternyata Kecamatan Wanaraya dapat dikatakan cukup padat dengan nilai 382. Artinya, setiap satu kilometer pada wilayah tersebut dihuni oleh sekitar 382 penduduk.

Terdapat 9 (sembilan) kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk dibawah nilai kepadatan penduduk kabupaten, yaitu Kecamatan Marabahan, Tabunganen, Barambai, Rantau Badauh, Tabukan, Cerbon, Bakumpai, Jejangkit, dan Kuripan. Dari kesembilan wilayah tersebut, salah satunya adalah Kecamatan Marabahan yang sekaligus sebagai Ibukota Kabupaten. Ternyata jika dibandingkan dengan kecamatan lain, wilayah ini masih belum terlalu padat dengan hanya dihuni oleh 99 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, wilayah dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Kuripan yang ditinggali sekitar 17 jiwa per satu kilometer persegi. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Alalak, luas wilayah Kecamatan Kuripan sembilan kali lebih luas, yaitu sebesar 343 km². Akan tetapi, penduduk yang tinggal di Kecamatan Kuripan jauh lebih sedikit dengan

wilayah yang sangat luas tersebut, sehingga nilai kepadatannya sangat kecil. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang diminatnya wilayah ini untuk tempat tinggal, diantaranya karena keterbatasan akses jalan antar desa maupun akses menuju ibukota kabupaten yang sebagian besar menggunakan transportasi air.

2.3 Struktur dan Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan variabel penting dalam demografi. Hampir semua pembahasan mengenai masalah kependudukan melibatkan variabel umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk antar satu daerah dengan daerah lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Struktur umur dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

Analisis mengenai struktur umur penduduk sangat penting untuk perencanaan dalam segala bidang maupun dunia bisnis. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan atau produk tertentu sangat bervariasi menurut umur. *Sex ratio* (rasio jenis kelamin) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Nilai *sex ratio* diperoleh dengan menghitung jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali 100. Sehingga nilai *sex ratio* menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Jika nilai *sex ratio* lebih dari 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, *sex ratio* Kabupaten Barito Kuala secara umum sebesar 103. Adapun jumlah penduduk dan *sex ratio* per kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.3. Berdasarkan data tersebut, penduduk Barito Kuala di tahun 2020 secara umum didominasi oleh penduduk usia 5-9 tahun, terlihat dari jumlah penduduk yang paling besar, yaitu sebanyak 29.432 jiwa. Selanjutnya,

diikuti oleh penduduk usia 0-4 tahun dan 10-14 tahun dengan jumlah penduduk masing-masing 26.988 jiwa dan 26.100 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada kelompok umur 70-74 tahun, dengan 3.720 jiwa, diikuti oleh penduduk usia 75 keatas dan 65-69 tahun dengan masing-masing sejumlah 4.305 dan 7.409 jiwa.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* Per kelompok Umur di Kabupaten Barito Kuala, 2020

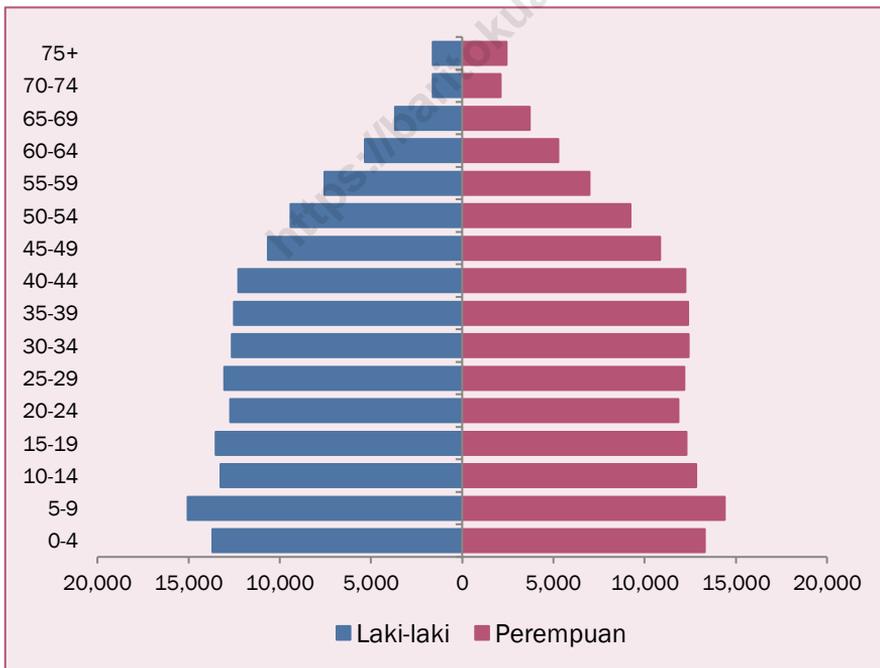
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	<i>Sex Ratio</i>
	Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-4	13 683	13 305	26 988	103
5-9	15 054	14 378	29 432	105
10-14	13 264	12 836	26 100	103
15-19	13 514	12 292	25 806	110
20-24	12 706	11 849	24 555	107
25-29	13 053	12 191	25 244	107
30-34	12 640	12 404	25 044	102
35-39	12 515	12 391	24 906	101
40-44	12 284	12 231	24 515	100
45-49	10 660	10 835	21 495	98
50-54	9 415	9 234	18 649	102
55-59	7 542	6 966	14 508	108
60-64	5 346	5 269	10 615	101
65-69	3 693	3 716	7 409	99
70-74	1 622	2 098	3 720	77
75+	1 602	2 433	4 035	66
Barito Kuala	158 593	154 428	313 021	103

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Lebih lanjut, untuk melihat kelompok umur yang didominasi oleh penduduk perempuan dengan nilai *sex ratio* kurang dari 100,

yaitu pada kelompok penduduk usia 45-49 tahun, 65-69 tahun, 70-74 tahun, dan lebih dari 75 tahun. Sementara itu, untuk kelompok umur yang memiliki nilai *sex ratio* lebih dari 100 didominasi oleh penduduk laki-laki. Jika dilihat berdasarkan nilai *sex ratio* tersebut, secara umum penduduk usia muda dan menengah didominasi oleh penduduk laki-laki, sementara penduduk usia tua didominasi oleh penduduk perempuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa harapan hidup penduduk perempuan di Barito Kuala lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.

Perubahan pada struktur umur penduduk akan terlihat lebih jelas dengan menggunakan piramida penduduk. Piramida penduduk meng-gambarkan perkembangan penduduk pada setiap kelompok umur yang berbeda. Piramida penduduk Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut.



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Barito Kuala, 2020

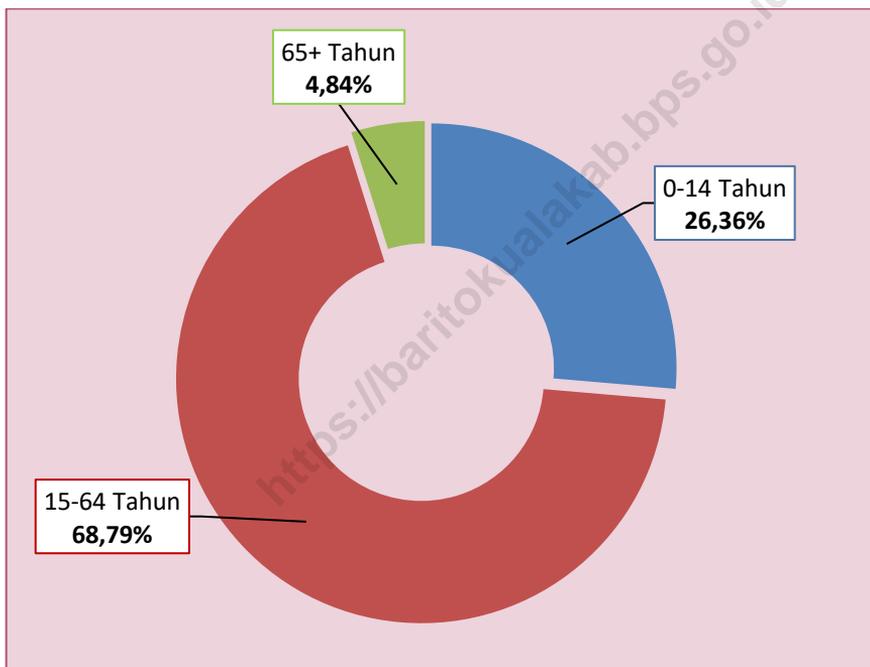
Perubahan pada bentuk piramida penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, tingkat kelangsungan hidup setiap kelompok umur, serta proses perpindahan penduduk. Piramida penduduk menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Dari piramida tersebut akan diperoleh gambaran mengenai perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan, penduduk kelompok anak-anak, usia produktif, dan lansia.

Berdasarkan Gambar 2.4, piramida penduduk kabupaten Barito Kuala merupakan piramida penduduk muda (*expensive*) yang ditandai dengan bagian dasar lebih lebar dari bagian puncaknya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda dan sedang mengalami pertumbuhan dengan tingkat kelahiran dan kematian yang relatif tinggi. Dengan struktur seperti ini, maka di masa yang akan datang penduduk Kabupaten Barito Kuala akan didominasi oleh penduduk muda. Dominasi penduduk usia muda ini akan menjadi keuntungan bagi pembangunan jika pemerintah bisa mengelola sumber daya ini dengan baik. Dalam arti menyediakan cukup pendidikan dan cukup lapangan pekerjaan.

Struktur umur penduduk dibagi menjadi kedalam tiga kelompok, yaitu 0 – 14 tahun, 15 – 64 tahun, dan 65 tahun keatas. Pada Tahun 2020, proporsi penduduk Kabupaten Barito Kuala pada kelompok umur 0 s d 14 tahun sebesar 27,92 persen, kelompok 15 s d 64 tahun sebesar 67,22 persen dan kelompok 65 tahun keatas sebesar 4,85 persen. Pembagian kelompok umur ini ditujukan untuk melihat rasio ketergantungan penduduk (*Dependency Ratio*).

Rasio ketergantungan didefinisikan sebagai jumlah orang yang tidak aktif secara ekonomi per 100 penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara sederhana biasanya digunakan rasio antara penduduk kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas terhadap penduduk kelompok umur 15-64 tahun. Penduduk muda berusia dibawah 15

tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggung kehidupannya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 2.4 Komposisi Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 2.5, dapat dilihat bahwa sebanyak 68,79 persen penduduk Barito Kuala merupakan penduduk yang ada pada usia produktif 15-64 tahun. Sementara 31,21 persen sisanya merupakan penduduk tidak produktif, yang terbagi menjadi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 26,36 tahun dan penduduk usia tua (65 tahun

keatas). Dari data tersebut, secara umum jumlah penduduk produktif lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak produktif. Untuk analisis lebih lanjut, berikut disajikan Tabel 2.4 yang menyajikan perbandingan angka raso ketergantungan berdasarkan kategori Dependency Ratio dan Jenis Kelamin di Barito Kuala.

Tabel 2.4 Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Rasio Ketergantungan	Jenis Kelamin		Barito Kuala
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Youth Dependency Ratio (YDR)</i>	38,30	38,35	38,32
<i>Old Dependency Ratio (ODR)</i>	6,31	7,81	7,04
<i>Dependency Ratio (DR)</i>	44,60	46,15	45,36

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Nilai rasio ketergantungan anak (YDR) diperoleh dengan membandingkan penduduk yang berusia 0-14 tahun terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Angka YDR sebesar 38,32 di Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 38 anak dibawah 15 tahun yang belum produktif. Sementara itu, ODR diperoleh dengan membandingkan penduduk usia lanjut (lebih dari 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif. Berdasarkan Tabel 2.4, rasio ketergantungan lanjut usia (ODR) sebesar 7,04 persen, menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar tujuh orang lanjut usia.

Semakin tinggi rasio ketergantungan akan menyita lebih banyak pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja. Keluarga-keluarga yang mempunyai jumlah anak banyak cenderung tidak mampu untuk menabung, akibatnya tingkat penanaman modal akan rendah. Penduduk dengan beban tanggungan anak tinggi harus

membagi dana investasi yang besar untuk penggunaan yang kurang produktif, misalnya untuk memenuhi konsumsi makanan dan non makanan dan bukan untuk investasi. Lebih jauh lagi, angka beban ketergantungan yang besar, akan memaksa pemerintah untuk lebih memprioritaskan penyediaan fasilitas sosial yang cukup besar daripada memperhatikan kualitasnya.

Untuk membandingkan struktur umur penduduk suatu wilayah yaitu apakah relatif lebih tua atau muda, maka secara cepat dapat digunakan umur median. Umur median dapat diartikan sebagai umur yang membagi tepat penduduk menjadi dua bagian yaitu di atas dan di bawah umur tersebut. Bila umur median kurang dari 20 tahun, maka penduduk di suatu wilayah dikategorikan sebagai penduduk muda. Sementara itu, umur median yang berada diantara 20-30 tahun dikategorikan sebagai penduduk *intermediate*. Sedangkan umur median yang berada di atas 30 tahun, dikategorikan sebagai penduduk tua. Dengan perkataan lain, semakin tinggi umur median penduduk suatu wilayah, maka semakin tua struktur umurnya. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, penduduk di Kabupaten Barito Kuala tergolong sebagai penduduk *intermediate* dengan nilai umur median terdapat di kisaran 25-29 tahun.

<https://baritokualakab.bps.go.id>

<https://baritokualakab.bps.go.id>

BAB III

KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu komponen utama dan penting dalam pembahasan kualitas hidup dan kesejahteraan suatu wilayah. Begitu pentingnya kesehatan dalam menentukan kesejahteraan, indikator kesehatan dijadikan beberapa tujuan dan target yang ingin dicapai pada *Millennium Development Goals*, antara lain Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara 1990 dan 2020; Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990 dan 2020; Mencapai dan menyediakan akses kesehatan reproduksi untuk semua pada 2020; dst.

Pembangunan di bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan mutu, pemerataan dan terjangkaunya pelayanan kesehatan sampai wilayah pelosok yang didukung oleh peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup sehat di masyarakat. Keseriusan pemerintah pun ditunjukkan dengan semakin besarnya alokasi anggaran untuk bidang kesehatan. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan angka harapan hidup.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata dan terjangkau. Bentuk realisasinya antara lain:

memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin melalui program Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesejahteraan Daerah (Jamkesda); menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan yang merata; meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan Polindes, Poskesdes, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas, dan rumah sakit; menyediakan obat-obatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kesakitan, persentase penolong kelahiran yang dilakukan oleh tenaga medis, lamanya bayi disusui, pemberian imunisasi, dan lain sebagainya.

3.1 Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan yang semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat ini juga menjadi salah satu ukuran tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Semakin baik derajat kesehatan penduduk di suatu wilayah, mengindikasikan semakin baik pula tingkat kesejahtraannya. Demikian pula sebaliknya, derajat kesehatan masyarakat yang buruk, mengindikasikan bahwa tingkat kesejahtraannya juga relatif rendah.

Indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan/morbiditas (*morbidity rate*). Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mengalami keluhan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari-hari pada periode sebulan terakhir sebelum pencacahan. Keluhan kesehatan tersebut antara lain, panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare, sakit kepala berulang,

sakit gigi, ataupun keluhan kesehatan lainnya seperti lumpuh, pikun, stroke, mata katarak, dll.

Tabel 3.1 Angka Morbiditas dan Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan di Kabupaten Barito Kuala Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2020

Indikator	Laki-laki dan Perempuan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Morbiditas	14,11	13,91	14,01
Persentase Penduduk Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan	60,11	52,01	55,55

Sumber : Hasil Susenas 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Angka Morbiditas Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 sebesar 14,01 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang penduduk terdapat 14 s.d. 15 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan aktivitas sehari-harinya terganggu akibat keluhan tersebut. Angka kesakitan untuk penduduk laki-laki di Kabupaten Barito Kuala secara umum pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan.

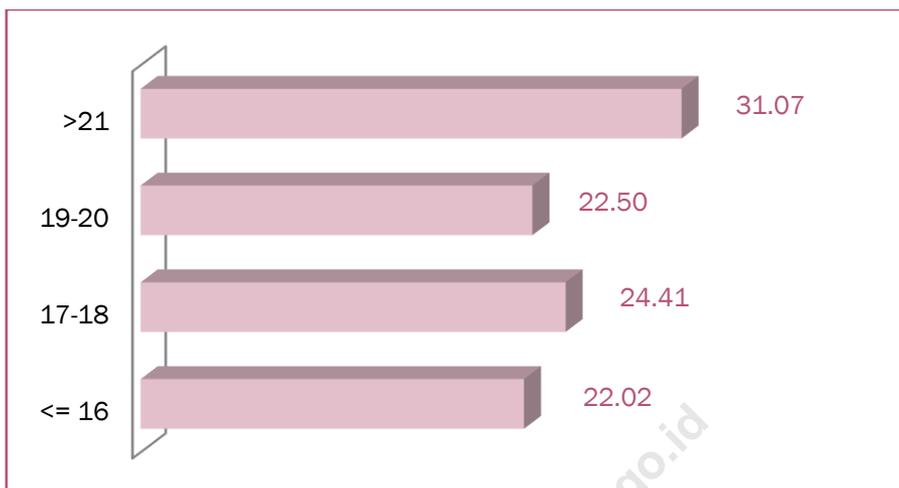
Berkaitan dengan angka morbiditas, kesehatan masyarakat biasanya dikaitkan dengan jaminan kesehatan yang dimiliki untuk mendapatkan pengobatan di fasilitas kesehatan. Jaminan kesehatan yang dimaksud baik berupa PBI (Penerima Bantuan Iuran) Pemerintah maupun Non-PBI. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), diperoleh persentase penduduk yang menggunakan Jaminan Kesehatan khususnya untuk berobat jalan. Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa terdapat 60,11 persen penduduk laki-laki di Barito Kuala menggunakan Jaminan Kesehatan untuk berobat jalan. Sementara untuk

penduduk perempuan, dari 100 orang yang mengalami keluhan kesehatan, sebanyak 52 orang diantaranya menggunakan Jaminan Kesehatan untuk berobat jalan di fasilitas kesehatan.

3. 2 Fertilitas dan Keluarga Berencana

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita. Secara tidak langsung, fertilitas berkaitan erat dengan banyaknya bayi yang lahir hidup. Sehingga, fertilitas sering disebut dengan kelahiran hidup (*live birth*), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang wanita dengan adanya tanda-tanda kehidupan seperti bernapas, berteriak, bergerak, jantung berdenyut, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, fertilitas akan langsung memengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah. Semakin besar angka fertilitas di suatu wilayah, semakin besar pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.

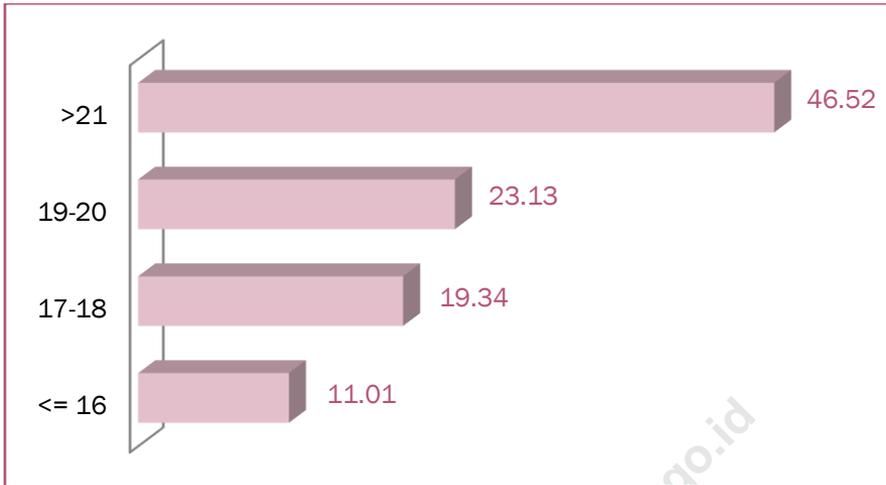
Salah satu faktor yang berhubungan dengan fertilitas adalah usia kawin pertama dan usia hamil pertama dari penduduk perempuan. Usia Kawin Pertama (UKP) yang dicakup dalam Susenas adalah umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif, artinya semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau dengan kata lain semakin banyak anak yang dilahirkan. Usia kawin pertama yang ditetapkan menurut UU No.1 tahun 1974 adalah ketika perempuan sudah berusia minimal 16 tahun. Grafik berikut menampilkan kondisi perempuan 10 tahun keatas yang pernah kawin di Barito Kuala berdasarkan usia kawin pertamanya.



Gambar 3.1 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama, 2020

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa sekitar sepertiga perempuan berusia 10 tahun keatas yang pernah kawin di Barito Kuala secara rata-rata melangsungkan perkawinan pertama pada usia lebih dari 21 tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang berada pada kelompok usia lebih dari 21 tahun, yaitu sebesar 31,07 persen. Sementara itu, masih terdapat 22,02 persen perempuan 10 tahun keatas yang pernah kawin yang melangsungkan kawin pertama saat berusia kurang dari 16 tahun. Artinya, dari 100 penduduk yang berusia 10 tahun keatas yang pernah kawin, 22 orang diantaranya melangsungkan perkawinan pertamanya saat usia 16 tahun kebawah.

Sejalan dengan usia kawin pertama, usia saat hamil pertama juga menentukan tingkat fertilitas. Semakin muda usia wanita yang mengalami kehamilan pertama, semakin panjang masa reproduksi wanita tersebut. Sehingga jika pada suatu wilayah banyak wanita yang hamil pertama pada saat usia yang lebih muda, maka kemungkinan penambahan penduduk di wilayah tersebut juga semakin cepat.



Gambar 3.2 Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Umur Saat Hamil Pertama, 2020

Berdasarkan gambar diatas, persentase tertinggi penduduk perempuan 15-49 tahun yang pernah hamil adalah mereka yang mengalami kehamilan pertama pada usia 21 tahun keatas dengan 46,52 persen. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa dari 100 perempuan 15-49 tahun yang pernah hamil, terdapat 46 orang diantaranya mengalami kehamilan pertama pada usia 21 tahun keatas, sementara sisanya sekitar 54 orang berusia kurang dari 21 tahun saat mengalami kehamilan pertama. Lebih lanjut, kondisi yang mungkin perlu menjadi perhatian pemerintah daerah adalah masih terdapat 11,01 persen perempuan 15-49 tahun yang pernah hamil yang mengalami kehamilan pertama saat umurnya masih dibawah 16 tahun.

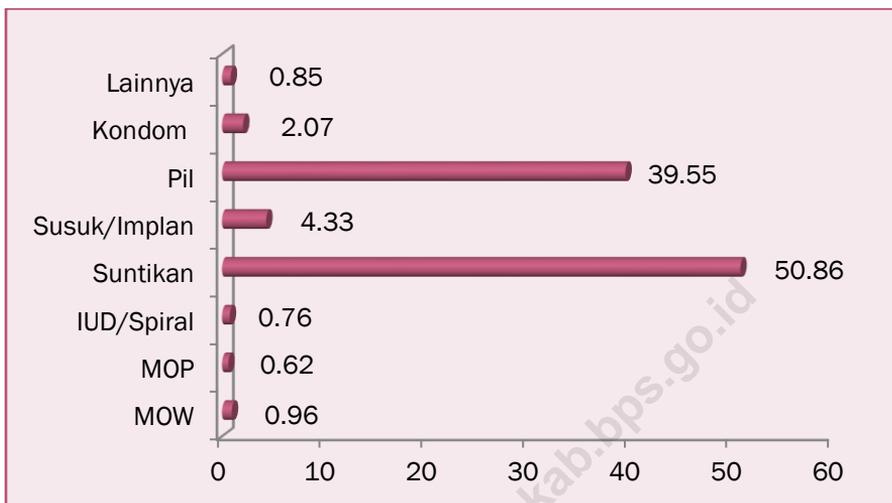
Berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, pemerintah baik pusat maupun daerah menerapkan kebijakan untuk mengendalikan penambahan penduduk agar tetap terkendali. Dalam rangka pengendalian kelahiran penduduk tersebut, program yang berkaitan adalah Keluarga Berencana (KB). Program yang sudah dicanangkan pada skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan

penambahan penduduk di Indonesia secara khusus dirancang agar menciptakan kemajuan, kestabilan, kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Wujud dari program ini adalah pemberian alat kontrasepsi untuk menunda serta mencegah kehamilan.

Partisipasi penggunaan alat KB di Barito Kuala termasuk cukup tinggi, yang ditunjukkan salah satunya melalui persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin yang sedang menggunakan alat KB untuk menunda atau mencegah kehamilan adalah sebesar 67,93 persen. Lebih lanjut, sebanyak 15,50 persen diantaranya pernah menggunakan alat KB namun sekarang tidak menggunakan lagi. Sementara itu, masih terdapat 16,57 persen perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin namun tidak pernah menggunakan alat KB. Berdasarkan hasil tersebut, jika pengendalian penduduk ingin tetap dilaksanakan, penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat masih perlu terus dilaksanakan melalui penyuluh KB atau tenaga kesehatan lainnya agar tingkat partisipasi penggunaan alat KB bisa mencapai hasil yang lebih baik.

Pemerintah daerah sudah melakukan beberapa aksi dalam rangka pengendalian dengan program KB tersebut, diantaranya dengan membagikan sejumlah alat KB ke masyarakat di 17 kecamatan di Barito Kuala. Bentuk Alat KB yang digunakan untuk pencegahan kehamilan sangat beragam, diantaranya adalah Sterilisasi Wanita/Tubektomi/MOW, Sterilisasi Pria/Vasektomi/MOP, IUD/AKDR/Spiral, suntikan, pil, Kondom Pria/Karet KB, dan Intravag/Kondom Wanita/Diafagma. Selain pengendalian/pencegahan kehamilan menggunakan alat KB modern, terdapat beberapa cara tradisional lain, diantaranya adalah metode menyusui alami, metode pantang berkala, dan metode lainnya. Grafik berikut akan menampilkan gambaran penggunaan alat KB oleh penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin. Berdasarkan hasil survey, tidak ada diantara responden tersebut

menggunakan cara tradisional, sehingga persentase yang ditunjukkan pada grafik hanya berdasarkan alat KB modern.



Gambar 3.3 Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan, 2020

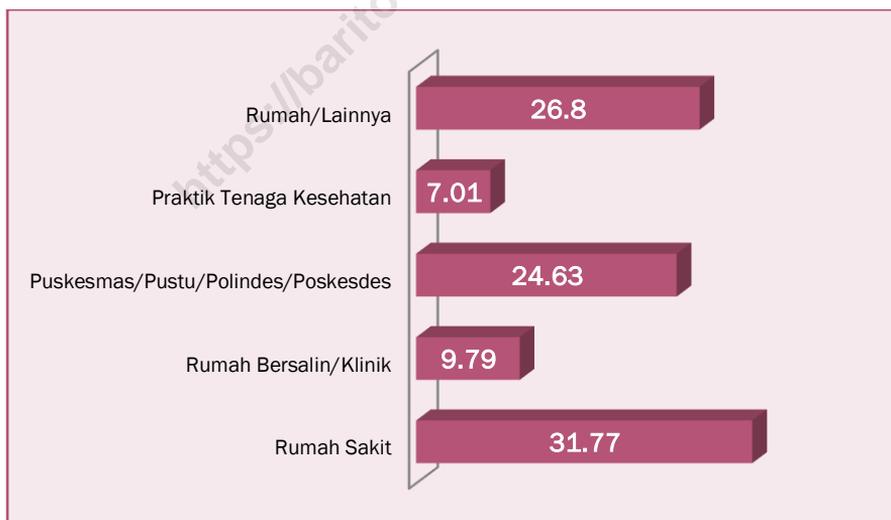
Gambar diatas menunjukkan bahwa separuh penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin di Barito Kuala memilih menggunakan alat KB suntik untuk pencegahan kehamilan, yaitu sebesar 50,86 persen. Alat KB modern berikutnya yang juga menjadi pilihan 39,55 persen penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin adalah pil. Sementara itu, alat KB lain seperti susuk/implan, kondom, IUD, MOP, MOW atau alat KB lainnya hanya digunakan oleh sebagian kecil penduduk perempuan di Barito Kuala dengan persentase secara keseluruhan kurang dari 10 persen.

3.3 Kesehatan Balita

Balita (bayi dibawah lima tahun) merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Pada masa balita ini merupakan usia emas (*Golden Age*) tumbuh kembang anak sehingga kecukupan asupan

gizi dan kesehatannya harus terpenuhi untuk menjadikannya manusia yang berkualitas di kemudian hari. Perhatian terhadap kesehatan balita harus dimulai sejak dalam kandungan, proses melahirkan dan proses menyusui. Proses persalinan berkaitan erat dengan keselamatan bayi yang dilahirkan dan sang ibu yang melahirkan. Penanganan yang tepat oleh tenaga penolong kelahiran yang berkualitas merupakan hal penting untuk mengurangi risiko kematian.

Salah satu target MDGs di bidang kesehatan yaitu menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu. Cakupan persalinan yang tinggi dan memenuhi standar merupakan indikator pendekatan (*proxy*) dari angka kematian bayi. Untuk mempercepat pencapaian target MDGs, Kementerian Kesehatan menetapkan kebijakan bahwa semua persalinan harus dilakukan oleh tenaga terlatih dan memulai Program Jaminan Persalinan (Jampersal), yaitu paket program yang mencakup pelayanan antenatal, persalinan, postnatal dan keluarga berencana.



Sumber : Hasil Susenas 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 3.4 Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Tempat Melahirkan, 2020

Berdasarkan hasil Susenas 2020 diatas, jumlah perempuan pernah kawin yang melahirkan di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit Pemerintah/Swasta, Puskesmas, atau Tempat Praktek Tenaga Kesehatan) mencapai 73,2 persen dengan rincian seperti yang terlihat pada Gambar 3.4. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir sudah melahirkan di fasilitas kesehatan. Akan tetapi, masih terdapat 26,8 persen diantaranya masih melahirkan di tempa selain fasilitas kesehatan. keterbatasan biaya, kebiasaan setempat, dan jauhnya akses terhadap fasilitas kesehatan di beberapa wilayah di Barito Kuala diduga menjadi faktor penyebab masih adanya pemanfaatan tempat melahirkan bukan fasilitas kesehatan seperti di rumah atau tempat lainnya.

Selain menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu, Salah target lain dari MDGs di bidang kesehatan adalah menurunkan anak yang lahir dengan berat badan rendah yaitu yang lahir dengan berat badan dibawah 2,5 kilogram. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 menghasilkan salah satu indikator yaitu berat lahir bayi dari perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan selama dua tahun terakhir.

Tabel 3.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dua Tahun Terakhir Menurut Kelompok Pengeluaran dan Berat Badan Bayi yang Dilahirkan Terakhir, 2020

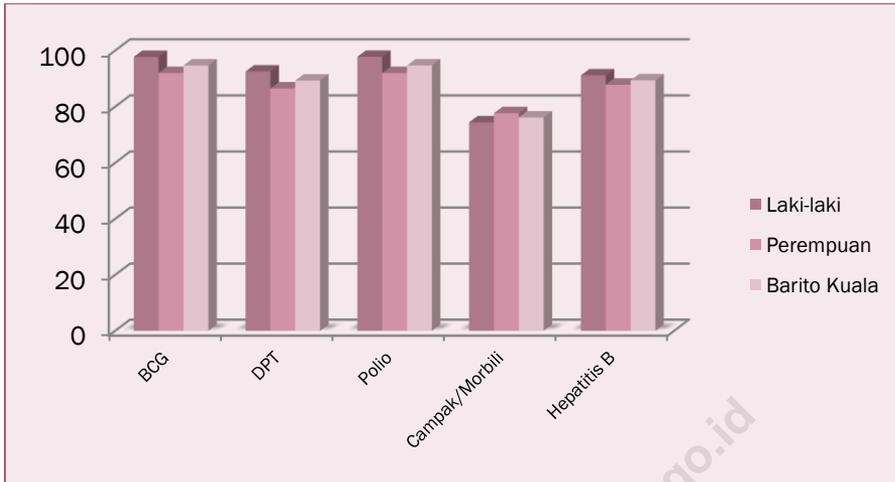
Indikator	< 2,5 kg	>= 2,5 kg	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
40 persen terbawah	19,07	80,93	100
40 persen tengah	20,82	79,13	100
20 persen teratas	14,51	85,49	100
Barito Kuala	19,02	80,89	100

Sumber : Hasil Susenas 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan Tabel 3.2., dapat dilihat bahwa di Kabupaten Barito Kuala, terdapat 80,89 persen bayi yang lahir diatas 2,5 kg, sementara sisanya yaitu sebesar 19,02 persen bayi lahir dengan berat badan rendah (<2,5 kg) pada tahun 2020. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga, dapat dikatakan bahwa semakin berada rumah tangga tersebut, semakin rendah persentase wanita yang melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Kondisi tersebut terlihat dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas, yang memiliki persentase bayi yang lahir dengan berat badan rendah paling rendah dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya, yaitu 14,51 persen, sementara pada kelompok pengeluaran rendah dan menengah, persentasenya sekitar 19-20 persen.

Dari segi kesehatan anak, pencegahan penyakit sejak usia dini dapat dilakukan dengan cara memberikan imunisasi pada balita. Imunisasi adalah pemberian suatu vaksin dalam tubuh seseorang dengan maksud meningkatkan kekebalan daya tahan tubuhnya terhadap penyakit tertentu. Terdapat dua jenis imunisasi yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi pasif merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir sedangkan imunisasi aktif adalah kekebalan yang didapatkan dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Imunisasi harus diberikan secara lengkap sesuai dengan umur anak. Anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari berbagai penyakit. Jenis imunisasi yang wajib diberikan kepada balita adalah BCG, DPT, Campak/morbili, dan Hepatitis B.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020 menunjukkan bahwa secara umum terdapat 94,95 persen balita di Barito Kuala memiliki Kartu Imunisasi, baik yang dapat diunjukkan maupun tidak. Lebih lanjut sebesar 61,69 persen balita mendapat imunisasi lengkap. Artinya, masih terdapat 38,31 persen balita yang belum mendapat imunisasi lengkap. Akan tetapi, kondisi ini dapat terjadi karena memang masih belum memenuhi kriteria umur untuk diberikan imunisasi tertentu.



Gambar 3.5 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 3.8, terdapat 93,40 persen balita yang pernah mendapatkan imunisasi BCG, meningkat 8,23 poin dari tahun 2018 yang nilainya sebesar 85,17 persen. Sementara itu, pencapaian pemberian imunisasi ke Balita untuk imunisasi DPT dan Polio masing-masing sebesar 88,92 persen dan 91,84 persen. Sedangkan untuk imunisasi campak/morbili hanya 72,4 persen dan hepatitis B sebesar 90,22 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat Balita di Barito Kuala yang belum mendapatkan imunisasi jenis tertentu. Untuk campak/morbili misalnya, masih terdapat sekitar 27 s.d. 28 balita dari 100 balita yang belum mendapatkan vaksin campak/morbili. Begitu pula untuk jenis vaksin DPT, dari 100 balita di Kabupaten Barito Kuala, masih terdapat sekitar 12 s.d. 13 balita yang belum mendapatkan vaksin tersebut di tahun 2020.

<https://baritokualakab.bps.go.id>

BAB IV

PENDIDIKAN

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi. Paling tidak ada dua alasan mengapa pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai isu pokok dalam pembangunan nasional bersama-sama dengan isu pembangunan ekonomi. Pertama, pendekatan pertumbuhan ekonomi nampaknya kurang berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan absolut maupun relatif. Sebaliknya, pendekatan pembangunan sumber daya manusia menjanjikan adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh pemerataan pendapatan. Kedua, pada era globalisasi saat ini keberhasilan suatu bangsa di ajang internasional tidak lagi ditentukan oleh keunggulan komparatif seperti kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, akan tetapi akan lebih ditentukan oleh keunggulan kompetitif, yang dalam hal ini akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Karenanya pendidikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi instrumen yang sangat penting untuk diperhatikan.

Peningkatan kualitas SDM bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan akan terbentuk SDM yang berkualitas bagi pembangunan. Mengenai pentingnya pendidikan telah banyak dikupas dalam teori yang cukup terkenal, yaitu *Human Capital Theory*. Teori ini berangkat dari suatu anggapan bahwa seseorang dapat meningkatkan pendapatannya melalui peningkatan pendidikan. Pendidikan juga dapat meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia.

Besarnya peranan pendidikan dalam menentukan kualitas SDM mendorong pemerintah untuk terus berupaya mencari terobosan agar

mutu dan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Sejak tahun 1970-an pemerintah Indonesia mulai memperlihatkan perhatiannya secara lebih terencana terhadap bidang pendidikan. Alokasi dana pendidikan selalu mengalami peningkatan setiap tahun anggaran. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan pendidikan di Indonesia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Demikian pula partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus meningkat. Kesemuanya itu berangkat dari kesadaran akan pentingnya pendidikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, keuntungan yang akan diperoleh dari investasi di bidang pendidikan antara lain sebagai salah satu cara untuk memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Pendidikan merupakan salah satu komponen dari indikator kesejahteraan rakyat yang harus mendapatkan perhatian sangat serius. Semakin baik tingkat pendidikan penduduk, maka semakin baik pula kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Barito Kuala, maka pada bab ini akan diuraikan mengenai keadaan pendidikan penduduk Kabupaten Barito Kuala melalui pendekatan indikator-indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut di olah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh BPS.

4.1 Angka Melek Huruf

Pada tingkat makro, salah satu ukuran mendasar yang digunakan untuk menilai keberhasilan pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk. Penduduk harus mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis agar dapat menerima berbagai informasi secara

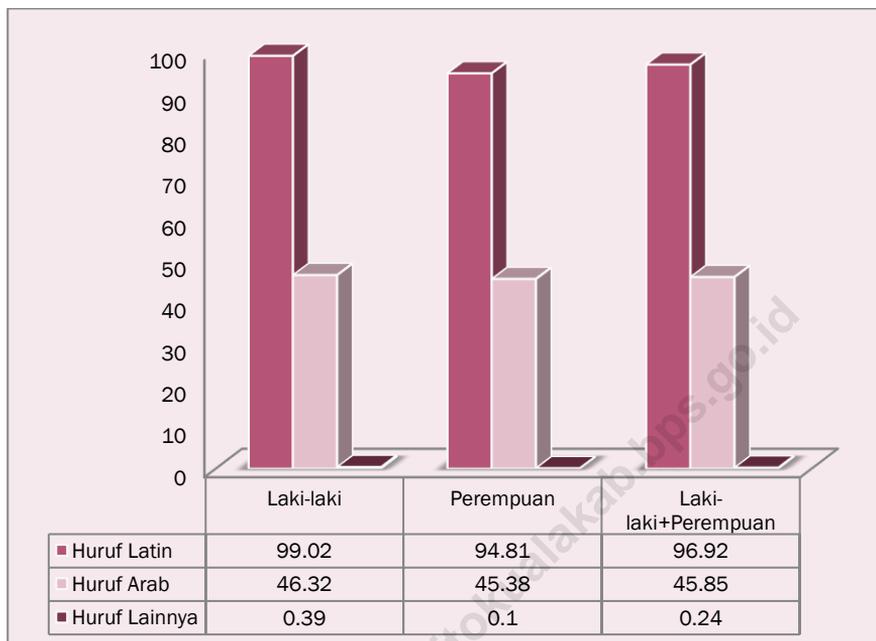
tertulis, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, kemampuan membaca dan menulis yang dicerminkan oleh indikator melek huruf merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk agar dapat menggapai hidup sejahtera.

Seseorang dikatakan melek huruf apabila orang tersebut dapat membaca dan menulis baik menggunakan huruf latin dan/atau huruf arab dan/atau huruf lainnya seperti aksara jawa, kanji, dll. Semakin meningkatnya angka melek huruf berarti semakin menurunnya angka buta huruf. Baik Angka Melek Huruf (AMH) maupun Angka Buta Huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. Angka melek huruf merupakan perbandingan banyaknya penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis terhadap jumlah penduduk 15 tahun ke atas.

Berdasarkan hasil Susenas, pencapaian angka melek huruf Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 adalah sebesar 96,92 persen. Angka ini sedikit menurun jika dibandingkan angka melek huruf tahun 2019 yang nilainya sebesar 96,95 persen. Hasil pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 96,92 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Barito Kuala yang sudah bisa membaca dan menulis baik huruf latin, arab ataupun huruf lainnya. Dengan kata lain, dapat dikatakan juga bahwa dari 100 orang penduduk usia 15 tahun keatas, terdapat 3 s.d. 4 orang diantaranya tidak bisa baca tulis baik huruf latin, arab, maupun huruf lainnya. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, AMH laki-laki yaitu 99,02 lebih tinggi dibandingkan AMH perempuan yang nilainya 94,81 untuk penduduk usia 15 tahun keatas.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan hak dasar kebutuhan manusia. Target *Millineum Development Goals* (MDGs) menetapkan tercapainya 50 persen peningkatan angka melek huruf orang dewasa pada tahun 2020, dengan penekanan khusus pada kemampuan membaca dan menulis bagi perempuan. Jika dilihat

berdasarkan jenis kelamin, AMH untuk perempuan sama dengan AMH laki-laki pada tahun 2020.



Sumber : Susenas 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 4.1 Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Selain dapat dilihat angka melek huruf secara umum, jika dilihat berdasarkan kategori jenis hurufnya, AMH huruf latin sebesar 96,92 persen. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat 96 s.d. 97 dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas di Barito Kuala dapat membaca tulisan latin, sementara sisanya tidak dapat membaca huruf latin. Lebih lanjut, AMH huruf latin laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sementara itu, kemampuan membaca dan menulis huruf arab secara umum adalah 45,85 persen. Artinya, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas di Barito Kuala, 45 s.d. 46 orang diantaranya dapat membaca huruf arab. Sama dengan huruf latin, ternyata AMH untuk huruf arab pada penduduk laki-laki juga lebih tinggi dibandingkan penduduk

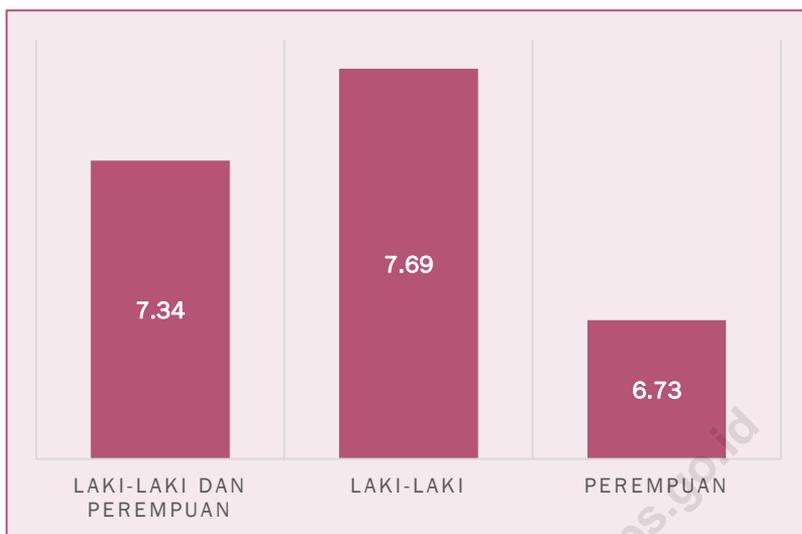
perempuan pada tahun 2020. AMH perempuan untuk kemampuan membaca huruf arab sebesar 45,38 sedangkan untuk laki-laki sebesar 46,32. Kemudian, untuk kemampuan membaca huruf lainnya secara umum adalah 0,24. Artinya, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas hanya sekitar 0 s.d. 1 orang yang dapat membaca huruf selain huruf latin dan huruf arab, seperti huruf jawa, atau huruf lainnya.

Secara umum, pada ketiga kategori huruf, AMH penduduk laki-laki cenderung lebih tinggi dari perempuan. Penduduk perempuan 15 tahun keatas yang tidak bisa membaca dan menulis kebanyakan berada pada kelompok usia 50 tahun keatas. Memang agak sulit untuk menerapkan program pemberantasan buta huruf terhadap penduduk yang sudah berumur, diperlukan kesadaran dan peran aktif dari yang bersangkutan untuk mengikuti program keaksaraan fungsional yang terus dikembangkan oleh pemerintah.

4.2 Rata-rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan lain yang bisa melihat mutu sumber daya manusia adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (*Means Years School*) menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalaninya. Semakin lama sekolah yang dilalui diharapkan semakin bagus kualitas dan keterampilan yang dimiliki. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen dalam penghitungan indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index-HDI*) dan maksimum lama sekolah yang harus dicapai adalah 25 tahun atau paling tidak penduduk telah menamatkan suatu jenjang akademi.

Rata-rata lama sekolah (RLS) di Barito Kuala cenderung lebih rendah dibandingkan angka di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara umum, RLS Kalimantan Selatan adalah sebesar 8,29 tahun. Sementara itu, RLS Barito Kuala secara umum adalah 7,34 tahun. Grafik berikut menyajikan informasi RLS berdasarkan jenis kelamin di Barito Kuala.



Sumber : Susenas 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 4.2 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Usia 25 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas pada tahun 2020 sebesar 7,34 tahun. Hal ini berarti bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas yang tinggal di Kabupaten Barito Kuala baru mampu menempuh pendidikan sampai 7 tahun atau setara dengan kelas 1 (satu) SMP saja dan putus sekolah dikelas 2 (dua) SMP. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki (7,69 tahun) lebih tinggi dari penduduk perempuan (6,73 tahun). Dengan kata lain, penduduk laki-laki berusia 25 tahun ke atas mampu menyelesaikan pendidikan sampai kelas 1 (satu) SMP sedangkan perempuan hanya sampai kelas 6 (enam) SD saja.

4.3 Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari status pendidikan. Semakin tinggi tingkat

pendidikan yang ditamatkan, seseorang diharapkan memiliki pengetahuan serta kemampuan dan keahlian yang lebih baik. Meningkatnya keterampilan seseorang akan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Status Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	1,38	0	0,70
Masih Bersekolah	71,87	65,17	68,27
SD/Sederajat	38,77	35,40	37,11
SMP/Sederajat	12,60	14,12	13,35
SMA/Sederajat	15,88	14,17	15,04
Perguruan Tinggi	4,62	1,48	3,07
Tidak Bersekolah Lagi	26,75	34,83	30,73
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan Tabel 4.1., pada tahun 2020, penduduk usia 7-24 tahun yang masih bersekolah di jenjang SD/Sederajat mencapai 37,11 persen secara total. Jika dilihat berdasarkan karakteristik, persentase penduduk laki-laki (38,77 persen) yang masih bersekolah di jenjang SD/Sederajat lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan (35,40 persen). Selanjutnya, penduduk yang masih bersekolah untuk jenjang

SMP/Sederajat sebesar 13,35 persen secara keseluruhan. Sementara itu, penduduk yang masih bersekolah di jenjang SMA/keatas sebesar 17,81 persen. Secara total, penduduk usia 7-24 tahun yang masih bersekolah di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 sebesar 68,27 persen, sebesar 0,7 persen tidak/belum pernah bersekolah, sementara sisanya sebanyak 30,73 persen sudah tidak bersekolah lagi, yaitu mereka yang sudah lulus SMA/ketas dan mereka yang putus sekolah baik di jenjang SD, SMP, maupun SMA/keatas.

Persentase penduduk 7-24 tahun yang masih bersekolah lebih di jenjang SD/Sederajat dan SMP/Sederajat pada tahun 2020 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, sementara pada jenjang SMA/ sederajat lebih banyak penduduk perempuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mereka yang cenderung tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMA/ sederajat lebih banyak berjenis kelamin laki-laki.

4.4 Tingkat Partisipasi

Tingkat partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak serta merta dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Indikator tingkat partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengukur proporsi keikutsertaan anak pada suatu jenjang pendidikan

tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Peningkatan kedua indikator tersebut setiap tahunnya menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Tabel 4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Penduduk Berumur 7 s.d. 18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Jenis Kelamin	APS		
	7 – 12	13 – 15	16 – 18
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	97,99	97,78	72,44
Perempuan	99,98	97,35	76,48
Barito Kuala	98,94	97,55	74,17

Sumber : Susenas 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, sehingga diharapkan makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pembangunan pendidikan di Barito Kuala telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Wajib Belajar 6 tahun yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan Wajib Belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses dimana standar program wajib

belajar dikatakan berhasil jika nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD lebih dari 95 persen dan APS SMP lebih dari 70 persen.

Berdasarkan data hasil Susenas tahun 2020, APS Barito Kuala usia 7-12 tahun mencapai 98,94. Artinya, terdapat 98,94 persen penduduk usia 7 s.d. 12 tahun (usia SD) sedang menjalani pendidikan atau masih bersekolah, baik jenjang SD maupun lebih. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, APS pada usia 7-12 tahun penduduk perempuan (99,98) lebih tinggi dibandingkan APS penduduk laki-laki (97,99). Lebih lanjut, pada penduduk yang berusia 13-15 tahun (usia SMP), angka partisipasinya adalah 97,55 secara keseluruhan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada kelompok ini, persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang bersekolah tidak jauh berbeda, yaitu pada kisaran 97 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pendidikan wajib belajar 9 tahun di Barito Kuala dapat dikatakan sudah berhasil karena APS tingkat SD melampaui 95 persen, dan APS tingkat SMP sudah melampaui 70 persen.

Pada kelompok penduduk 16-18 tahun, APS tahun 2020 mencapai 74,17. Angka ini tercatat naik dibandingkan APS tahun 2019 yang nilainya 73,93 persen. Berbeda dengan kelompok penduduk usia SD dan SMP, capaian APS pada kelompok ini masih cenderung lebih rendah. Dengan hasil tersebut, artinya masih terdapat 15,83 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak sedang bersekolah. Selain itu, terdapat perbedaan yang cukup terlihat antara APS laki-laki (72,44) dengan APS perempuan (76,48) pada kelompok usia SMA ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih cenderung melanjutkan sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi. Meskipun dapat dikatakan berhasil dalam pencapaian program wajib belajar 9 tahun, pemerintah Barito Kuala perlu lebih bekerja keras untuk mendorong partisipasi khususnya untuk penduduk usia 16-18 tahun dalam rangka menyukseskan Program Pendidikan 12 tahun.

Indikator pendidikan penting lainnya untuk melihat penyerapan penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM menyatakan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Pada APM usia anak sekolah di setiap jenjang pendidikan sangat diperhatikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan banyaknya anak yang sekolah diluar sistem pendidikan seperti menunda saat mulai sekolah, murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah sementara waktu, dan lulus lebih awal. Indikator ini sudah memperhitungkan usia standar seorang anak dalam menempuh pendidikan, usia 7 s.d. 12 tahun untuk sekolah SD sederajat, 13 s.d. 15 tahun untuk SMP sederajat dan 16 s.d. 18 tahun untuk SMA sederajat. Misal APM siswa SD adalah angka yang membandingkan jumlah anak usia 7 s.d. 12 tahun yang masih bersekolah di jenjang SD dengan jumlah penduduk usia 7 s.d. 12 tahun secara keseluruhan.

Tabel 4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2020

Jenis Kelamin	APM		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	97,51	75,88	58,70
Perempuan	99,98	75,80	65,76
Barito Kuala	98,68	75,84	61,73

Sumber : Susenas 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan Data Susenas 2020 pada Tabel 4.3, APM SD pada tahun 2020 adalah 98,98 persen. Artinya, dari 100 penduduk usia 7-12

tahun, terdapat 2 s.d. 3 anak yang tidak sedang bersekolah di jenjang Sekolah Dasar. Sama halnya dengan APS, APM SD penduduk perempuan (99,98) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (97,51) di tahun 2020.

Pada tingkat SMP sederajat, APM tahun 2020 adalah sebesar 75,84. Artinya, dari 100 penduduk usia 13-15 tahun, terdapat 75 s.d. 76 penduduk yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SMP/sederajat. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, APM perempuan pada kelompok ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan APM laki-laki. Persentase penduduk laki-laki usia 13 s.d. 15 tahun dan sedang bersekolah di tingkat SMP/sederajat sebesar 75,88 persen, sedangkan persentase penduduk perempuan usia yang sama, 75,80 persen di antaranya sedang bersekolah di tingkat SMP/sederajat. Angka ini tercatat lebih rendah dibandingkan APM pada tahun 2019 yang nilainya sebesar 76,08 persen. Pada indikator APS, capaian kelompok usia ini melebihi 97 persen, namun pada APM nilainya berada pada kisaran 75 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 22 persen penduduk 13-15 tahun yang sedang bersekolah tidak berada pada jenjang SMP/sederajat. Hal ini bisa terjadi karena usia masuk sekolah yang terlalu cepat atau adanya keterlambatan karena tinggal kelas atau yang lainnya.

Pada jenjang yang lebih tinggi yaitu tingkat SMA/sederajat, nilai APM di Barito Kuala pada tahun 2020 adalah 61,73 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk yang berusia 16-18 tahun, 61 s.d. 62 orang diantaranya sedang menempuh pendidikan pada jenjang SMA/sederajat. Pada kelompok ini, nilai APM antara penduduk laki-laki dan perempuan cukup jauh berbeda. Nilai APM SMA untuk laki-laki sebesar 58,70 persen, sementara APM perempuan sebesar 65,76 persen. Kondisi ini juga sejalan dengan nilai APS di kelompok umur yang sama, partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sejalan dengan kelompok SMP, pada tingkat SMA/sederajat, selisih antara nilai APS dan APM cukup signifikan, yaitu sekitar 12,44 persen.

<https://baritokualakab.bps.go.id>

<https://baritokualakab.bps.go.id>

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen penggerak roda pembangunan perekonomian nasional. Khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Titik sentral pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah perencanaan tenaga kerja yang mencakup: 1) penyusunan program penyediaan tenaga profesional untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan usaha atau kegiatan pembangunan yang direncanakan; 2) penyusunan program penciptaan kesempatan kerja supaya dapat menggunakan sumber daya manusia secara optimal; 3) terciptanya lapangan kerja baik dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Dalam merencanakan pembangunan yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja, diperlukan suatu perencanaan tenaga kerja (*manpower planning*) yang tepat. Suatu daerah harus bisa memperkirakan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kualitas tenaga kerja dan keperluan sektoral minimal sampai dengan lima tahun mendatang. Kalau disebut tentang kualitas tenaga kerja, hal ini berhubungan dengan apa yang disebut sebagai "*human capital*". Ciri khusus yang dimiliki oleh faktor produksi ini adalah jika sering dipakai mereka tidak akan hilang atau berkurang. Dengan semakin sering faktor produksi ini dipakai bukan kadarnya semakin berkurang tetapi justru sebaliknya dan bahkan nilainya menjadi semakin tinggi pula. Identifikasi dan kuantifikasi dalam pasar tenaga kerja seperti underutilisasi tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) adalah langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, problematika ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Kuala tidak jauh berbeda dengan permasalahan ketenagakerjaan di wilayah lain di Indonesia. Permasalahan itu berkaitan dengan tingkat pengangguran, jumlah jam kerja, dan ketidakmerataan penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor lapangan usaha. Akibatnya, beberapa sektor ketenagakerjaan yang potensial tidak berkembang secara optimal. Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut maka perlu disusun kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang terpola dan terpadu. Hal ini menuntut tersedianya data dan informasi yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Barito Kuala. Indikator yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Daya Serap Tenaga Kerja, Produktivitas Pekerja, maupun tingkat pengangguran. Indikator-indikator tersebut dihasilkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahun. Pada tahun 2020, BPS tidak bisa melaksanakan kegiatan Sakernas Tahunan karena ada penghematan APBN. Dampaknya adalah data ketenagakerjaan tahun 2020 sampai level kabupaten/kota tidak bisa disajikan. Oleh karena itu, dalam publikasi ini akan menyajikan data ketenagakerjaan tahun 2020.

5. 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pembangunan banyak dipengaruhi oleh hubungan antara manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain, ketersediaan pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Suatu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Indikator ini menggambarkan besarnya keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Indikator ketenagakerjaan seperti TPAK

ataupun yang lainnya dihasilkan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) dibedakan menjadi penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Pengelompokan ini berdasarkan pada jenis kegiatan utama yang dilakukan selama seminggu yang lalu. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi atau ingin terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk yang masuk dalam kelompok ini adalah penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak terlibat dalam pasar kerja, yaitu penduduk dengan kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (seperti: pensiunan, penerima pendapatan/transfer, jompo atau alasan lain).

Tabel 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	88,98	60,37	74,61
Bukan Angkatan Kerja (%)	11,02	39,63	25,39
Total	100	100	100

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2020

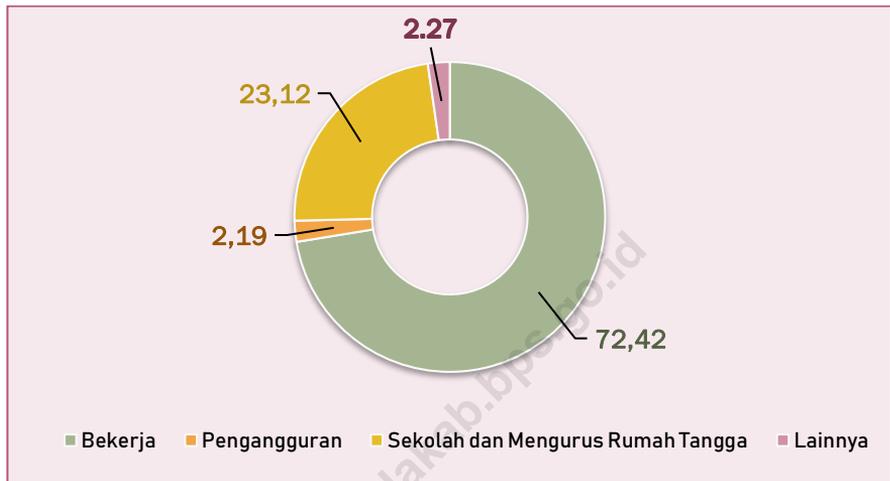
Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020, nilai TPAK Barito Kuala adalah sebesar 74,61 persen. Lebih lanjut, sebanyak 25,39 persen diantaranya adalah termasuk dalam

kategori bukan angkatan kerja. Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa, jika terdapat 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sekitar 75 orang diantaranya termasuk angkatan kerja, baik yang bekerja, yang punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun pengangguran. Sementara itu, sisanya yaitu sekitar 25 orang tidak termasuk dalam angkatan kerja. Selain itu, dari tabel 5.1, dapat dilihat juga bahwa TPAK laki-laki (88,98 persen) lebih tinggi dibandingkan perempuan (60,37 persen). Hal ini terjadi karena memang sebagian penduduk perempuan di Barito Kuala hanya melakukan kegiatan mengurus rumah tangga, sehingga persentase angkatan kerja perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Akan tetapi, TPAK perempuan di Barito Kuala tahun 2020 tersebut meningkat dari tahun 2019 yang nilainya 59,66 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan di Barito Kuala yang aktif di pasar tenaga kerja.

Konsep bekerja yang digunakan dalam Sakernas adalah seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut dalam kurun waktu seminggu yang lalu. Termasuk didalamnya kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Sementara itu, pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Berkaitan dengan penduduk yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, sekolah yang dimaksud dalam Sakernas adalah kegiatan seseorang untuk menempuh pendidikan di sekolah formal, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sementara itu, mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang untuk mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah (tidak termasuk

pembantu/asisten rumah tangga). Untuk mengetahui lebih rinci, berikut disajikan grafik yang menggambarkan kondisi penduduk usia 15 tahun keatas berdasarkan kegiatan utama dari hasil Sakernas Agustus 2020.

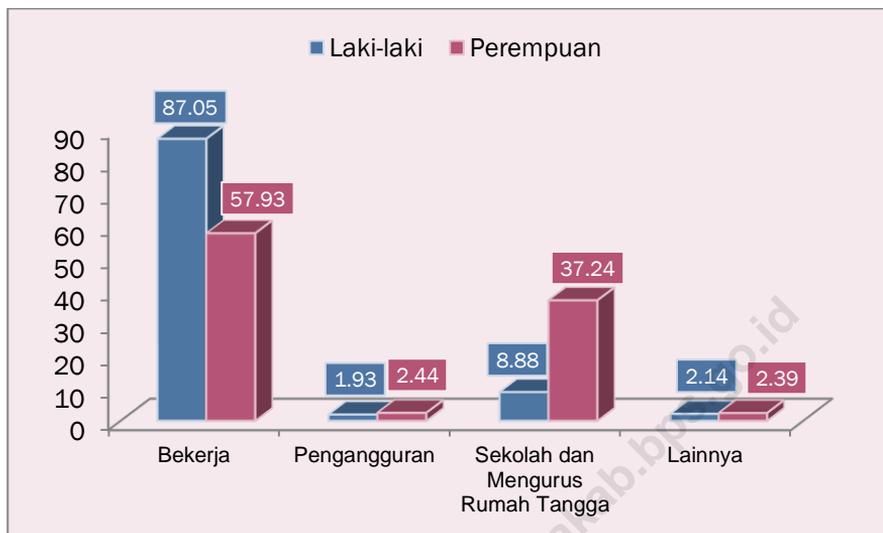


Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2020

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Barito Kuala, 2020

Berdasarkan grafik diatas, dapat diperoleh informasi bahwa dari 74,61 persen yang termasuk angkatan kerja di Barito Kuala pada tahun 2020, 72,42 persen diantaranya adalah bekerja, sementara sisanya 2,19 persen adalah pengangguran. Sementara itu, dari 25,39 persen yang merupakan bukan angkatan kerja, 23,12 persen diantaranya adalah masih bersekolah atau mengurus rumah tangga, dan terdapat 2,27 persen yang melakukan kegiatan lainnya. Sebagai contoh sederhana, jika terdapat 100 penduduk usia 15 tahun keatas di Barito Kuala, maka terdapat sekitar 73 orang yang bekerja, 2 orang pengangguran, 23 orang masih bersekolah atau mengurus rumah tangga, dan 2 orang lainnya adalah pensiunan, penerima pendapatan/transfer, jompo atau penerima pendapatan lainnya. Secara lebih rinci, grafik berikut akan

menampilkan kondisi penduduk usia 15 tahun keatas berdasarkan jenis kelamin dan kegiatan utama yang dilakukan.



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2020

Gambar 5.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala, 2020

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi penduduk laki-laki yang bekerja lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nilai persentase penduduk laki-laki usia 15 tahun keatas yang bekerja adalah 87,05 persen. Dengan kata lain, dari 100 penduduk laki-laki usia 15 tahun keatas di Barito Kuala, sekitar 87 orang diantaranya bekerja. Kondisi yang berbeda terlihat pada penduduk perempuan, dengan nilai persentase sebesar 57,93 persen berarti dari 100 penduduk perempuan usia 15 tahun keatas hanya sekitar 58 orang diantaranya yang bekerja. Persentase terbesar kedua setelah bekerja adalah kegiatan sekolah dan mengurus rumah tangga. Pada kegiatan ini, persentase penduduk perempuan lebih tinggi (37,24 persen) dibandingkan penduduk laki-laki (8,88 persen).

Sebagai perbandingan, dari 100 penduduk laki-laki usia 15 tahun keatas sekitar 87 orang diantaranya bekerja, 9 orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, 2 orang penerima pendapatan atau melakukan kegiatan lainnya, dan sisanya 2 orang adalah pengangguran. Sementara itu, distribusi persentase penduduk perempuan cukup berbeda. Jika terdapat 100 perempuan usia 15 tahun keatas, 58 orang diantaranya bekerja, 37 orang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, 2 orang penerima pendapatan atau melakukan kegiatan lainnya, dan sisanya sekitar 3 orang pengangguran.

5.2 Daya Serap Tenaga Kerja

Indikator persentase penduduk yang bekerja di setiap lapangan usaha biasa dipakai sebagai salah satu indikator potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Sektor lapangan usaha secara garis besar terbagi kedalam tiga kategori, yaitu pertanian, industri, dan jasa.

Tabel 5.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Kuala, Agustus 2020

Sektor Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Barito Kuala
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	52,98	49,66	51,65
Pertambangan, Penggalian, Industri, dan Konstruksi	16,92	8,21	13,42
Perdagangan, Jasa, dan lainnya	30,10	42,13	34,93
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, 2020

Seperti yang terlihat pada Tabel 5.2., sektor lapangan usaha di Kabupaten Barito Kuala yang mampu menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 51,65 persen, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang nilainya 50,14 persen. Dengan kata lain, lebih dari separuh penduduk usia 15 tahun keatas bekerja di sektor tersebut. Sebagai salah satu daerah yang menjadi lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan hal ini tentunya wajar terjadi. Namun terdapat kelemahan dari sektor pertanian bahwa antara jumlah tenaga kerja yang mampu diserap pada sektor pertanian tersebut dengan nilai tambah yang dihasilkannya tidak seimbang, sehingga tingkat produktivitasnya cenderung rendah. Sektor kedua yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor perdagangan, rumah makan, jasa, dan lain-lain sebesar 34,93 persen. Sementara untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri, Konstruksi, serta Listrik Air dan Gas dapat menyerap 13,42 persen penduduk yang bekerja, menurun dari tahun sebelumnya yang proporsinya 15,75 persen. Penurunan pada sektor ini menyumbang kenaikan untuk sektor pertanian dan sektor perdagangan dan jasa. Kondisi tersebut dapat terjadi salah satunya karena adanya pandemi Covid-19 yang memaksa sebagian masyarakat untuk mengubah pekerjaan mereka. Karyawan industri besar di wilayah ini yang terkena dampak pengurangan pekerja contohnya, mereka beralih ke sektor lain seperti pertanian atau perdagangan *online* untuk tetap mendapatkan penghasilan.

Jika dianalisis berdasarkan jenis kelamin, sektor lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak baik laki-laki maupun perempuan adalah sektor pertanian yaitu masing-masing sebesar 52,98 dan 49,66 persen. Jika dilakukan perbandingan, pada sektor pertambangan, konstruksi, dan industri penyerapan tenaga kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan. Pada sektor tersebut penyerapan tenaga kerja laki-laki sebesar 16,92 persen sedangkan perempuan hanya 8,21 persen. Hal ini terjadi karena jenis

pekerjaan di lapangan usaha tersebut cenderung lebih berat seperti buruh angkut pada penggalian pasir, buruh pabrik industri penggilingan padi, dan sejenisnya yang memerlukan tenaga laki-laki dibandingkan perempuan. Kondisi sebaliknya terjadi pada sektor Jasa. Pada sektor ini, penyerapan tenaga kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2020, proporsi tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor Jasa mencapai 42,13 persen sedangkan laki-laki 30,10 persen.

Tabel 5.3 Persentase penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Kuala, 2020

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	15,91	15,50	15,75
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	30,55	13,63	23,75
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	2,64	1,32	2,11
Buruh/Karyawan/Pegawai	31,58	20,22	27,02
Pekerja Bebas	8,81	4,71	7,16
Pekerja Keluarga/Pekerja Tidak Dibayar	10,51	44,62	24,21
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Olah data Sakernas, BPS Barito Kuala 2020

Secara sederhana, kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Sektor formal adalah penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu

dengan buruh tetap/buruh dibayar serta penduduk yang bekerja dengan status bekerja sebagai buruh, karyawan dan pegawai. Sedangkan sektor informal adalah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu dengan buruh atau karyawan tidak dibayar, pekerja keluarga, pekerja bebas dan lainnya. Berdasarkan tabel 5.3, pada tahun 2020 di Kabupaten Barito Kuala terdapat 29,13 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja di sektor formal, yaitu berasal dari pekerja yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar (2,11 persen) dan status buruh/karyawan/pegawai (27,02 persen). Sementara sisanya yaitu 70,87 persen bekerja di sektor informal, yang berasal dari pekerja usia diatas 15 tahun dengan status berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, secara umum persentase penduduk yang bekerja di sektor formal sedikit mengalami penurunan, yang sebelumnya bernilai 29,35 persen di tahun 2019. Penurunan ini dapat terjadi salah satunya karena pengurangan pegawai di beberapa industri besar akibat pandemi Covid-19, sehingga sebagian dari masyarakat tersebut beralih ke sektor informal.

Lebih lanjut, berdasarkan Tabel 5.3. jika dirinci berdasarkan status pekerjaannya, terdapat sebanyak 27,02 persen pekerja di Kabupaten Barito Kuala yang berstatus karyawan/buruh/pegawai dan 23,75 persen berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar. Selain itu, terdapat sebanyak 24,21 persen pekerja di Barito Kuala berstatus pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Artinya hampir seperempat pekerja adalah mereka yang bekerja tetapi hanya membantu untuk mendapatkan penghasilan. Mereka memiliki aktivitas bekerja namun tidak mendapatkan balas jasa atau memperoleh pendapatan secara langsung atas pekerjaan yang dilakukan yang bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sementara itu, terdapat 15,75 persen penduduk usia 15 tahun keatas di Barito Kuala yang memilih untuk berusaha sendiri, dengan menanggung risiko

dan tanpa dibantu pekerja lain. Untuk kategori pekerja bebas dan berusaha dengan dibantu buruh dibayar masing-masing sebesar 7,16 dan 2,11 persen.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi pekerja sektor formal lebih besar untuk penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan. Penduduk laki-laki yang bekerja di sektor formal mencapai 34,22 persen, sedangkan untuk penduduk perempuan persentasenya sebesar 21,54 persen. Penurunan pekerja di sektor formal juga terjadi di kedua kelompok penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2019, terdapat 34,35 persen penduduk laki-laki yang termasuk di sektor formal, sedangkan perempuan nilainya 21,68 persen. Sementara itu, di sektor informal penduduk perempuan mendominasi yaitu sebesar 78,46 persen.

Pekerja laki-laki di sektor formal didominasi oleh mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yang persentasenya sebesar 31,58 persen, sementara persentase pekerja yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar hanya sebagian kecil, yaitu sebesar 2,64 persen. Sementara itu, di sektor informal, pekerja perempuan didominasi oleh pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar dengan persentase sebesar 44,62 persen, diikuti oleh pekerja berusaha sendiri 15,50 persen; pekerja berusaha pekerja tidak tetap/tidak dibayar dengan persentase sebesar 13,63 persen; dan pekerja bebas sebesar 4,17 persen. Persentase pekerja keluarga/tidak dibayar ini lebih besar untuk penduduk perempuan dibandingkan laki-laki. Untuk pekerja tidak dibayar, proporsi perempuan (44,62 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki (10,51 persen). Hal ini dikarenakan biasanya dalam suatu keluarga, para istri yang membantu usaha suaminya sebagai keluarga. Kondisi ini sejalan dengan persentase pekerja dengan status pekerjaannya berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, proporsi penduduk laki-laki (30,55 persen) yang lebih besar dibandingkan penduduk perempuan (13,63 persen). Perbedaan yang cukup signifikan juga terlihat pada proporsi pekerja bebas antara

penduduk laki-laki dan perempuan. Proporsi penduduk laki-laki yang termasuk pekerja bebas sebesar 8,81 persen, sementara untuk perempuan sebesar 4,71 persen. Perbedaan ini mungkin terjadi karena pekerja bebas atau serabutan biasanya adalah pekerja kasar, sehingga didominasi oleh laki-laki.

5.3 Produktivitas Pekerja

Indikator yang digunakan untuk melihat produktivitas dan optimalisasi para pekerja dalam lapangan usaha yang dilakukan adalah indikator jumlah jam kerja keseluruhan. Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam), yang terdiri dari setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Selain itu seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau keterampilannya.

Berdasarkan Tabel 5.4., di Kabupaten Barito Kuala persentase pekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja normal (dibawah 35 jam) selama satu minggu yang lalu, yaitu sebesar 32,39 persen, termasuk didalamnya setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Proporsi pekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja normal (dibawah 35 jam) selama satu minggu yang lalu lebih banyak penduduk berjenis kelamin perempuan (39,03 persen) dibandingkan laki-laki (27,84 persen). Banyaknya penduduk dengan jam kerja kurang dari 35 jam ini disebabkan sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian yang tidak menuntut jam kerja yang tinggi kecuali pada saat tertentu saja seperti musim tanam atau musim panen.

Tabel 5.4 Persentase Pengangguran, Setengah Pengangguran, Pekerja Paruh Waktu dan Pekerja Penuh Waktu Kabupaten Barito Kuala, Agustus 2020

Angkatan Kerja	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengangguran	2,17	4,05	2,93
Setengah Pengangguran	9,35	6,61	8,24
Pekerja Paruh Waktu	18,49	32,42	24,15
Pekerja Penuh Waktu	69,99	56,92	64,68
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Olah data Sakernas, BPS Barito Kuala 2020

Penduduk laki-laki didominasi oleh pekerja penuh waktu yaitu mereka yang bekerja dengan jam kerja 35 jam atau lebih per minggu, dengan proporsi sebesar 69,99 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang nilainya 71,40 persen. Biasanya jenis pekerjaan yang menuntut jam kerja yang tinggi seperti buruh/karyawan di pabrik atau perusahaan, sopir, penjaga keamanan, dll yang memang didominasi oleh pekerja laki-laki. Sejalan dengan penduduk laki-laki, kondisi angkatan kerja penduduk perempuan juga didominasi oleh pekerja penuh waktu, namun dengan proporsi yang lebih kecil yaitu sebesar 56,92 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang bernilai 55,77 persen. Dengan proporsi total penduduk laki-laki dan perempuan yang didominasi oleh pekerja penuh waktu yaitu sebesar 64,68 persen. Meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2019, dapat dikatakan bahwa angkatan kerja di Barito Kuala masih cukup produktif jika dilihat dari sisi total jam kerja per minggu.

5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu isu penting dalam bidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Isu ini menjadi fokus perhatian selain kondisi perkembangan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan. Ditinjau dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan hasil dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia, Jumlah lapangan kerja yang tersedia memiliki keterbatasan secara jumlah dan kualifikasi bagi pencari kerja. Pengangguran merupakan akibat dari peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Lapangan kerja semakin sempit sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja, Dalam bahasan ini yang termasuk penganggur adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja yang pada saat pencacahan tidak bekerja, tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), serta tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (*future starts*). Indikator yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini merupakan perbandingan jumlah pengangguran yang dimaksud terhadap jumlah penduduk angkatan kerja.

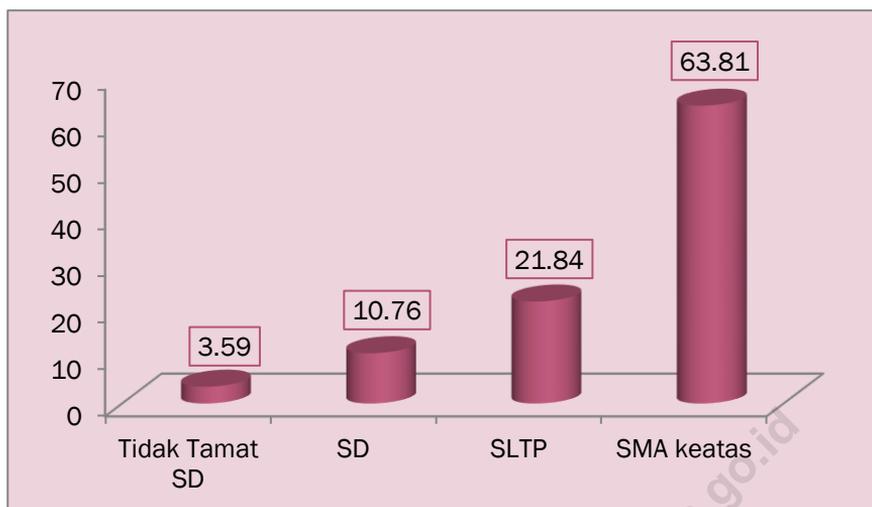
Berdasarkan Gambar 5.3 berikut, pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Kuala secara umum adalah 2,93 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja, terdapat 2 s.d. 3 orang diantaranya adalah pengangguran. Jika dibandingkan dengan TPT tahun 2019 yang nilainya sebesar 2,51 persen, angka TPT secara umum dapat dikatakan sedikit mengalami peningkatan. Peningkatan ini juga tidak lepas dari dampak pandemi, mengingat pada bulan Agustus 2020, masih diberlakukan pembatasan.



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, Agustus 2020

Gambar 5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala, 2020

Lebih lanjut, jika dilihat berdasarkan karakteristiknya, pada penduduk perempuan tingkat pengangguran lebih tinggi yaitu sebesar 4,05 persen, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 2,17 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas, terdapat 3 s.d. 4 orang diantaranya yang tidak bekerja/menganggur di tahun 2020, begitu juga untuk penduduk laki-laki. Jika dibandingkan dengan angka di tahun 2019, untuk penduduk perempuan, nilai TPT meningkat dari yang sebelumnya 2,23 persen menjadi 4,05 persen, sedangkan angka TPT penduduk laki-laki menurun, dari 2,71 persen menjadi 2,17 persen. Selain dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan.



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, Agustus 2020

Gambar 5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Barito Kuala, 2020

Berdasarkan Gambar 5.4. diatas, terlihat bahwa persentase pengangguran tertinggi pada mereka yang menamatkan pendidikan SMA ke atas yaitu sebesar 63,81 persen. Dengan kata lain, di tahun 2020, lebih dari setengah pengangguran terbuka adalah mereka yang menamatkan pendidikan minimal sampai jenjang SMA. Angka ini meningkat dari tahun 2019 yang bernilai 55,85 persen. Selanjutnya diikuti oleh mereka yang lulusan SMP dengan persentase sebesar 21,84 persen, diikuti dengan pendidikan yang ditamatkan SD dan tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD dengan proporsi masing-masing sebesar 10,76 dan 3,59 persen. Kondisi tersebut dapat terjadi karena dengan sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor dengan angkatan kerja yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMP ke bawah. Sementara itu, mereka yang menamatkan pendidikan SMA ke atas cenderung menginginkan pekerjaan yang stabil di sektor formal yang biasanya adalah mereka yang masih mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha.

<https://baritokualakab.bps.go.id>

BAB VI

PERUMAHAN

Kebutuhan akan perumahan (papan) merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang disamping kebutuhan pangan dan sandang, Arti fisik perumahan/pemukiman adalah tempat tinggal individu/anggota masyarakat yang biasanya hidup dalam ikatan perkawinan atau keluarga dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Dalam pengertian yang luas, rumah bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat tinggal atau hunian yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat, Oleh karena itu, rumah seharusnya mampu memberikan rasa nyaman bagi penghuninya sekaligus harus memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah juga berfungsi sebagai tempat pembinaan keluarga. Di dalam rumah, penghuni memperoleh kesan pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini, Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh dan berkembang, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya, dan lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya. Dalam fungsinya sebagai tempat tinggal, selayaknya sebuah rumah memiliki bentuk fisik dan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, fungsi rumah sebagai sarana pembinaan keluarga dapat memperoleh hasil yang maksimal yaitu tercapainya peningkatan kualitas SDM.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal

mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen No. 9 Tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis. Menurut Krieger dan Higgins (2002), selain merupakan kebutuhan dasar manusia, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Karena itu, rumah yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat. Rumah yang sehat tidak lepas dari ketersediaan fasilitas terkait seperti penyediaan air bersih, sanitasi layak, dan tersedianya pelayanan sosial.

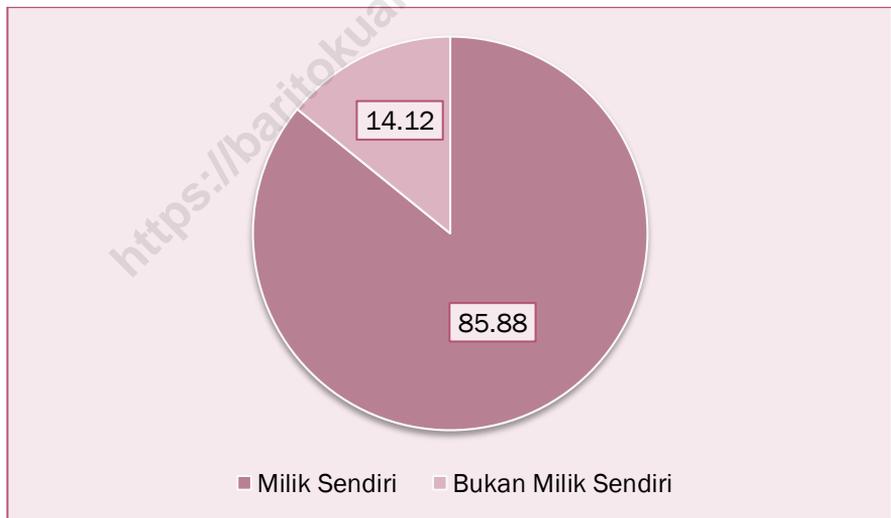
Undang-Undang No, 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah, Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Penilaian terhadap kondisi pemukiman yang mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat melalui beberapa indikator diantaranya: status penguasaan rumah tempat tinggal; kualitas material perumahan seperti atap, dinding dan lantai terluas; fasilitas penunjang yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas

perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1 Penguasaan Tempat Tinggal

Status penguasaan tempat tinggal merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Semakin banyak persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Persentase rumah milik sendiri ini menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi salah satu kebutuhan pokok hidupnya, yaitu papan (tempat tinggal).



Sumber: Olah Susenas 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Kuala, 2020

Berdasarkan hasil Susenas 2020 Kabupaten Barito Kuala pada Gambar 6.1, secara umum sebagian besar rumah tangga sudah tinggal

di rumah milik sendiri yaitu sebesar 85,88 persen. Selain rumah milik sendiri, terdapat sebanyak 14,12 persen rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah selain milik sendiri (termasuk didalamnya yang kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas/lainnya). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin Kepala Rumah Tangga (KRT), persentase rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri lebih banyak KRT perempuan (93,01 persen) dibandingkan KRT laki-laki (84,7 persen). Sebaliknya, pada rumah tangga yang tinggal di bangunan yang bukan milik sendiri, persentase rumah tangga dengan KRT laki-laki (15,3 persen) lebih besar daripada KRT perempuan (6,99 persen).

Besarnya angka kepemilikan rumah sendiri secara umum mengindikasikan bahwa pembangunan perumahan secara umum berjalan dengan dinamis seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan tingkat kesejahteraan, khususnya di daerah yang berdekatan dengan Ibukota Provinsi dan yang berada di Ibukota Kabupaten. Perkembangan sektor perumahan yang dinamis hendaknya turut pula diimbangi dengan keselarasan dampaknya terhadap lingkungan, agar pembangunan rumah dan bangunan tetap ramah terhadap lingkungan.

6.2 Fasilitas Tempat Tinggal

Tingkat kesejahteraan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kualitas bangunannya akan tetapi juga ditentukan oleh fasilitas yang digunakan oleh rumah tangga tersebut, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, penerangan, bahan bakar memasak maupun pelayanan sosial. Penyediaan berbagai macam fasilitas penunjang rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi rumah tangga tersebut. Rumah tangga yang dapat menyediakan fasilitas penunjang tempat tinggal yang memadai tentu memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup bagus. Selain itu, kelengkapan fasilitas tempat tinggal suatu rumah akan menentukan kenyamanan tempat tinggal yang akan berdampak pada kualitas rumah itu sendiri.

Sumber Air Minum

Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan dapat dipastikan tanpa pengembangan sumber daya air secara konsisten peradaban manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat ini. Oleh karena itu, pengembangan dan pengolahan sumber daya air merupakan dasar peradaban manusia, Dari Pengertian dan Definisi Air maka dapat di ambil kesimpulan bahwa salah satu faktor penting penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk kebutuhan air minum. Air bersih merupakan air yang harus bebas dari mikroorganisme penyebab penyakit dan bahan-bahan kimia yang dapat merugikan kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Air merupakan zat kehidupan, di mana tidak ada satu pun makhluk hidup di bumi ini yang tidak membutuhkan air.



Sumber: Olah Susenas 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Barito Kuala, 2020

Salah satu kelengkapan fasilitas rumah tangga adalah tersedianya fasilitas air minum yang memadai. Sumber air minum yang berasal dari air kemasan, air isi ulang, ledeng dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat kurang dari 10 meter dikategorikan sebagai sumber air minum bersih. Selanjutnya, sumber air minum yang berasal dari ledeng, air hujan, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 meter dikategorikan dalam sumber air minum layak. Selain itu terdapat juga sumber air minum utama yang berasal dari air hujan dan air permukaan seperti dari sungai, danau, dan sejenisnya.

Gambar 6.1. menyajikan grafik persentase penggunaan air minum utama rumah tangga di Barito Kuala tahun 2020. Dari grafik tersebut terlihat bahwa persentase terbesar penggunaan air minum rumah tangga di Barito Kuala tahun 2020 adalah air permukaan/air hujan/lainnya, yaitu sebesar 63,03 persen. Artinya, hampir sepertiga dari rumah tangga di Barito Kuala tahun 2020 masih belum terpenuhi sumber air minum bersih ataupun sumber air minum layak. Masih besarnya persentase rumah tangga yang belum mengakses air bersih maupun air layak di Kabupaten Barito Kuala dikarenakan sebagian masyarakat masih menggunakan air sungai sebagai sumber minum yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori air minum bersih maupun air minum layak. Hal ini patut jadi perhatian pemerintah daerah untuk menyediakan program penyediaan air bersih khususnya di daerah perdesaan sehingga dapat mewujudkan program Millenium Development Goals (MDGs) tujuan 7 yaitu Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup. Perkembangan pembangunan dunia yang berarah kepada pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dimana salah satu tujuannya adalah mencapai akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun

2030. Fokusnya tidak hanya penggunaan air bersih saja tetapi air minum layak.

Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Salah satu indikator perumahan yang berhubungan dengan sanitasi adalah keberadaan tempat buang air besar (BAB). Indikator ini juga terkat dengan kesadaran masyarakat pada kesehatan. Fasilitas buang air besar (jamban) merupakan salah satu sarana pokok untuk mewujudkan kehidupan yang sehat. Tersedianya fasilitas yang memadai akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan pribadi manusia. Oleh karena itu, peningkatan jenis fasilitas buang air besar dan peningkatan wawasan masyarakat tentang pentingnya sarana ini harus terus disampaikan secara persuasif dan intensif.



Sumber: Olah Susenas 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Barito Kuala, 2020

Jamban yaitu suatu pembuangan yang digunakan oleh keluarga atau sejumlah keluarga untuk buang air besar. Cara

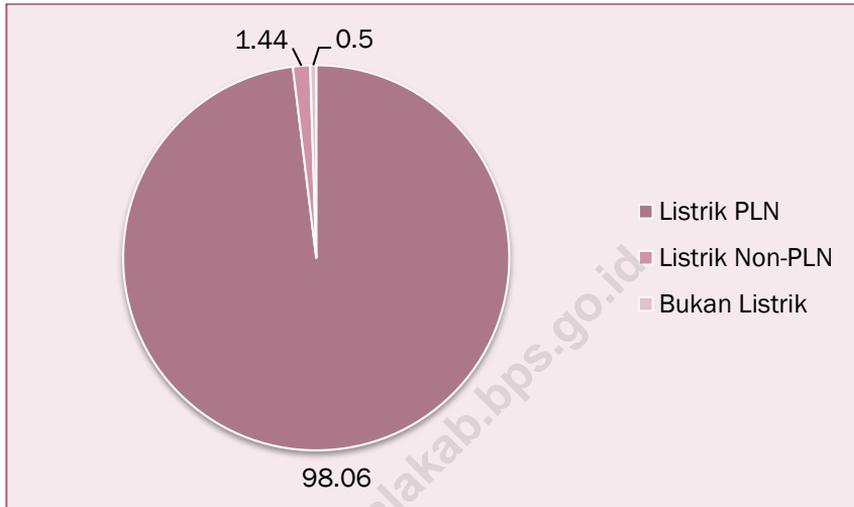
pembuangan tinja, prinsipnya yaitu: kotoran manusia tidak mencemari permukaan tanah, kotoran manusia tidak mencemari air permukaan/air tanah, kotoran manusia tidak dijamah lalat, jamban tidak menimbulkan bau yang mengganggu, konstruksi jamban tidak menimbulkan kecelakaan, dan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL).

Berdasarkan Gambar 6.3, pada tahun 2020 di Kabupaten Barito Kuala terdapat 62,67 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri, sementara rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air yang digunakan bersama sebesar 27,57 persen. Sebagian dari rumah tangga juga masih ada yang menggunakan MCK komunal/umum yaitu sebesar 9,53 persen, sementara sisanya sekitar 0,23 persen rumah tangga memiliki fasilitas buang air namun tidak menggunakannya dan rumah tangga yang sama sekali tidak memiliki fasilitas tersebut. Jika dibandingkan tahun 2019 yang nilainya sebesar 62,65 persen, persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sendiri dapat dikatakan relatif sama. Meskipun demikian, persentase rumah tangga yang tidak menggunakan/tidak memiliki fasilitas buang air besar jauh menurun, yaitu yang sebelumnya di tahun 2019 sebesar 5,5 persen, pada tahun 2020 menjadi kurang dari satu persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, upaya pemerintah daerah dengan pembangunan MCK umum telah membantu sebagian masyarakat yang belum memiliki fasilitas sendiri.

Penerangan

Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditempati adalah tersedianya fasilitas penerangan yang memadai. Fasilitas penerangan rumah terdiri dari rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN dan non PLN) dan yang menggunakan penerangan selain listrik seperti lampu minyak, obor, dan lain-lain termasuk yang tidak menggunakan penerangan. Pemakaian penerangan berupa listrik dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Penduduk yang dapat mengakses

listrik dapat diasumsikan telah mempunyai kemampuan ekonomi yang relatif lebih baik dan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengembangkan kehidupan sosial dan ekonominya.



Sumber: Olah Susenas 2020, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan di Kabupaten Barito Kuala, 2020

Berdasarkan Gambar 6.4, ditinjau dari sumber penerangan utama yang menggunakan listrik, mayoritas rumah tangga (98,06 persen) di Barito telah menggunakan listrik yang bersumber dari PLN. Sementara itu, terdapat sebesar 1,44 persen rumah tangga menggunakan listrik yang bukan bersumber dari PLN seperti genset pribadi atau sejenisnya. Lebih lanjut, terdapat 0,5 persen rumah tangga yang masih belum menggunakan listrik seperti menggunakan lampu minyak atau sejenisnya. Jika dibandingkan dengan kondisi penerangan di tahun 2019, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik yang bersumber dari PLN meningkat dari yang sebelumnya 96,82 persen menjadi 98,06 persen. Seiring dengan peningkatan tersebut, persentase rumah tangga yang tidak menggunakan listrik juga menurun, yaitu yang sebelumnya 0,61 persen menjadi 0,5 persen. Rumah tangga yang tidak menggunakan listrik disebabkan oleh wilayah

tempat tinggal yang belum terjangkau oleh listrik PLN atau memang rumah tangga tersebut tidak mampu secara ekonomi untuk membayar biaya pemasangannya.

<https://baritokualakab.bps.go.id>

<https://baritokualakab.bps.go.id>

BAB VII

POLA KONSUMSI DAN KEMISKINAN

7.1 Pola Konsumsi

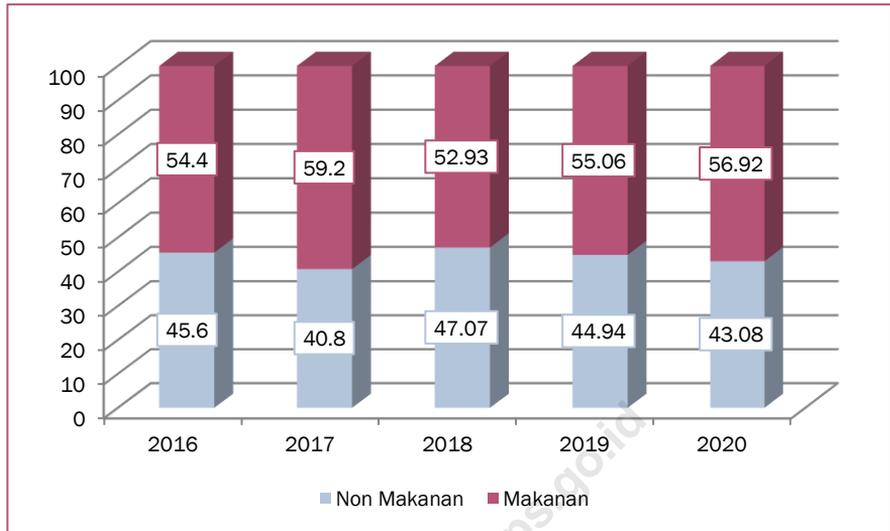
Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan dengan pendapatan/penghasilannya. Pada kenyataannya sangat sulit untuk mendapatkan data pendapatan/penghasilan penduduk melalui sebuah survei. Hambatan teknis pada saat wawancara ialah adanya kecenderungan masyarakat memberikan jawaban yang kurang relevan. Sebaliknya apabila ditanyakan tentang pengeluaran konsumsi, penduduk/masyarakat memberikan jawaban dengan jujur dan relevan. Oleh karena itu, digunakan pendekatan melalui besarnya pengeluaran dalam suatu rumah tangga dalam suatu jangka waktu tertentu, baik untuk kebutuhan makanan maupun non makanan. Besarnya nilai nominal (rupiah) yang dibelanjakan baik dalam bentuk makanan maupun non makanan, secara tidak langsung dapat mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga, untuk mencukupi kebutuhan yang mencakup barang dan jasa.

Secara umum konsumsi/pengeluaran rumah tangga terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kedua jenis pengeluaran tersebut, dapat dilihat bagaimana pola konsumsi masyarakat. Tingkat kebutuhan/permintaan (*demand*) terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas akan mendahulukan pemenuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan

porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Pergeseran komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sementara elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini semakin jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan (kalau bukan disimpan/ditabung atau diinvestasikan kembali).

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dan perubahan komposisinya sebagai indikasi perubahan tingkat kesejahteraan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Sebaliknya di negara-negara maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa, merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumahtangga. Pengeluaran tersebut tidak bersifat primer lagi, antara lain pengeluaran untuk perawatan kesehatan, perawatan kecantikan, peningkatan pendidikan, rekreasi, olah raga dan sebagainya.

Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012-2018, rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita selama sebulan hanya Rp.571.202,- saja. Kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya yaitu sebesar Rp.665.817 (2013), Rp.748.851 (2014), Rp.825.799 (2017), Rp.1.029.615 (2018), dan Rp.944.672 (2019). Peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Barito Kuala pada periode tersebut. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita di Barito Kuala meningkat peningkatan menjadi Rp.1.018.285 per bulan. Lebih lanjut, pengeluaran per kapita dapat dilihat juga berdasarkan kelompok pengeluaran makanan dan bukan makanan.



Sumber: Olah Susenas 2020, Kabupaten Barito Kuala

Gambar 7.1 Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 s.d. 2020

Seperti yang terlihat pada gambar 7.1., pada tahun 2020 proporsi non makanan (43,08 persen) menurun dibandingkan tahun sebelumnya di tahun yang nilainya sebesar 44,94 persen. Sebaliknya, untuk proporsi makanan di Barito Kuala meningkat dari sebelumnya sebesar 55,06 pada tahun 2019 menjadi 56,92 persen di tahun 2020. Jika dilihat tren kedua kelompok tersebut dari tahun 2016-2020, pengeluaran per kapita per kelompok di Barito Kuala cukup fluktuatif untuk masing-masing kelompok meskipun secara umum memiliki tren yang positif. Selain dikelompokkan menjadi makanan dan non makanan, pengeluaran per kapita juga dapat dirinci menurut komoditas jenis pengeluaran. Tabel berikut menyajikan rata-rata pengeluaran dan persentase rumah tangga menurut jenis pengeluaran di Barito Kuala pada tahun 2020.

Tabel 7.1 Pengeluaran Makanan Per kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 s.d. 2020

JENIS PENGELUARAN	Rata-rata Pengeluaran (Rp)		Persentase (%)	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MAKANAN	520 166	579 623	55,06	56,92
A. Padi-padian	69 540	75 644	7,36	7,43
B. Umbi-umbian	2 951	3 294	0,31	0,32
C. Ikan/udang/cumi	58 254	64 332	6,17	6,32
D. Daging	14 966	15 418	1,58	1,51
E. Telur & Susu	29 339	30 019	3,11	2,95
F. Sayur-sayuran	30 478	36 127	3,23	3,55
G. Kacang-kacangan	7 707	7 432	0,82	0,73
H. Buah-buahan	20 826	22 240	2,20	2,18
I. Minyak dan lemak	13 320	14 816	1,41	1,45
J. Bahan minuman	20 016	24 774	2,12	2,43
K. Bumbu-bumbuan	12 798	13 667	1,35	1,34
L. Konsumsi lainnya	13 570	15 033	1,44	1,48
M. Makanan dan minuman jadi	168 678	193 608	17,86	19,01
N. Rokok dan tembakau	57 720	63 219	6,11	6,21

JENIS PENGELUARAN	Rata-rata Pengeluaran Persentase (Rp)		Persentase(%)	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NON MAKANAN	424 506	438 662	44,94	43,08
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	221 907	223 555	23,49	21,95
Aneka barang & jasa	88 856	84 704	9,41	8,32
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	26 689	27 700	2,83	2,72
Barang tahan lama	40 893	67 978	4,33	6,68
Pajak, pungutan, dan asuransi	28 913	22 484	3,06	2,21
Keperluan pesta dan upacara	17 249	12 242	1,83	1,20
JUMLAH PENGELUARAN MAKANAN DAN NON MAKANAN	944 672	1 018 285	100,00	100,00

Sumber: Olah Susenas 2020, Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan Tabel 7.2 terlihat bahwa pada tahun 2020 porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga kelompok makanan yang terbesar adalah konsumsi padi-padian dan makanan jadi. Pada kelompok makanan dan minuman jadi, persentase pengeluarannya mencapai 19,01 persen dari total pengeluaran makanan dan non makanan, sementara

padi-padian menyumbang 7,43 persen dari total pengeluaran. Jika dibandingkan dengan pengeluaran tahun 2019, persentase kedua komoditas tersebut meningkat, khususnya untuk makanan dan minuman jadi yang meningkat 1,15 poin, sementara untuk padi-padian meningkat 0,07 poin persen. Konsumsi bahan makanan terbesar selanjutnya ada pada kelompok ikan/udang/cumi dengan nilai sebesar 6,32 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,17 persen. Lebih lanjut, kelompok makanan terbesar setelah itu adalah rokok yang pada tahun 2020 juga persentasenya meningkat, yang sebelumnya sebesar 6,11 persen di tahun 2019 menjadi sebesar 6,21 persen di tahun 2020.

Pada kelompok non makanan, pembiayaan untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga memiliki proporsi terbesar yaitu mencapai 21,95 persen. Nilai ini secara tren sedikit menurun dari tahun 2019 yang mencapai 23,49 persen. Penurunan komoditas ini dan beberapa komoditas lain yang turut menyumbang penurunan persentase pengeluaran nonmakanan secara keseluruhan dari 44,94 persen di tahun 2019 menjadi sebesar 43,08 persen. Penurunan porsi komoditas non makanan dibandingkan komoditas makanan di Barito Kuala mengindikasikan adanya penurunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan nilai pertumbuhan ekonomi yang negatif di tahun 2020 yang disebabkan utamanya karena pandemi yang masih berlangsung di sepanjang tahun.

7.2 Distribusi Pendapatan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang dilihat dari peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan diantara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan beberapa masalah sosial. Tidak

tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* (pendekatan) pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak hasilnya dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah perkembangan yang terjadi.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Menurut kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, ada indikator yang juga sering digunakan, yaitu Indeks Gini. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut :

- a. memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi,
- b. memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang,
- c. memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

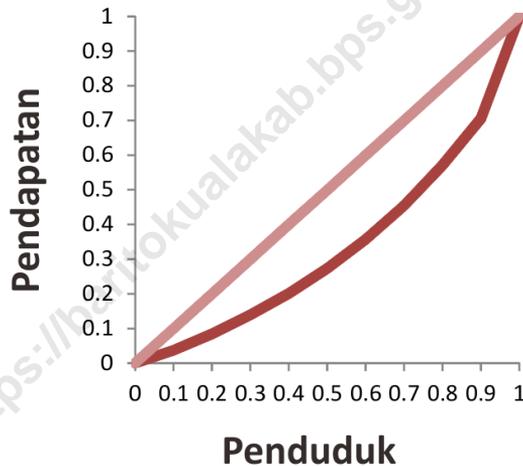
Tabel 7.2 Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 s.d. 2020

Tahun	40 % [Bawah]	40 % [Tengah]	20 % [Atas]	Gini Ratio (Indeks Gini)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	22,87	39,14	37,99	0,27
2009	23,09	37,25	39,66	0,29
2010	23,91	38,53	37,56	0,26
2011 Backcasting	20,89	36,84	42,28	0,32
2012 Backcasting	21,16	36,77	42,06	0,32
2013 Backcasting	20,79	35,57	43,63	0,33
2014	20,13	36,98	42,89	0,34
2015	19,27	35,55	45,18	0,36
2016	21,29	39,04	39,67	0,31
2017	22,35	37,23	40,42	0,31
2018	14,35	26,00	59,63	0,34
2019	16,27	28,73	55,00	0,34
2020	16,82	29,04	54,13	0,28

Sumber: Hasil Susenas Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan data Susenas 2020 Pada Tabel 7.2., untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala, dapat dihitung bahwa 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah menerima 16,82 persen dari seluruh pendapatan masyarakat. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 dianggap sedang. Sedangkan untuk golongan 40 persen penduduk yang berpendapatan menengah menerima 29,04 persen dari seluruh pendapatan masyarakat, sementara golongan 20 persen penduduk yang berpendapatan paling atas menerima 54,13 persen dari seluruh pendapatan masyarakat.

Ukuran yang juga digunakan untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan adalah indeks gini. Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna, dimana semua nilai sama) hingga satu (ketimpangan yang sempurna, dimana satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.



Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Jika rasio lebih dari 0,5, maka terjadi ketimpangan yang tajam dan cukup serius, dan jika rasio berkisar antara 0,30–0,49 maka distribusi pendapatan relatif merata. Olah data Susenas menunjukkan bahwa Indeks Gini Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 sebesar 0,28. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan penduduk Barito Kuala cukup merata. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan gini ratio pada tahun 2019

yang nilainya 0,34, artinya distribusi pendapatan antar kelompok pendapatan pada tahun 2020 relatif lebih merata dibandingkan tahun sebelumnya.

7.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang sangat kompleks yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dan masih dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu isu global yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan pertama SDGs yang berbunyi mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun mempunyai target yaitu pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari. Tingkat kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional dan untuk menentukan garis kemiskinan internasional tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*) masing-masing negara yang berbeda-beda.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia. Angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan, justru lebih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi.

Kemiskinan menjadi isu penting dalam pembangunan, terutama bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Kemiskinan berdampak pada pemenuhan aspek kehidupan lain seperti kesehatan, pendidikan serta

sandang dan pangan. Hubungan ini seperti lingkaran setan dimana jika tidak diputus, akan tetap berlanjut bahkan tingkat kemiskinan menjadi semakin tinggi. Pengentasan kemiskinan yang terukur dan terarah menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan. Oleh karena itu, penentuan konsep dan definisi orang miskin harus selaras agar terdapat keterbandingan pembangunan antardaerah.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS (2008) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

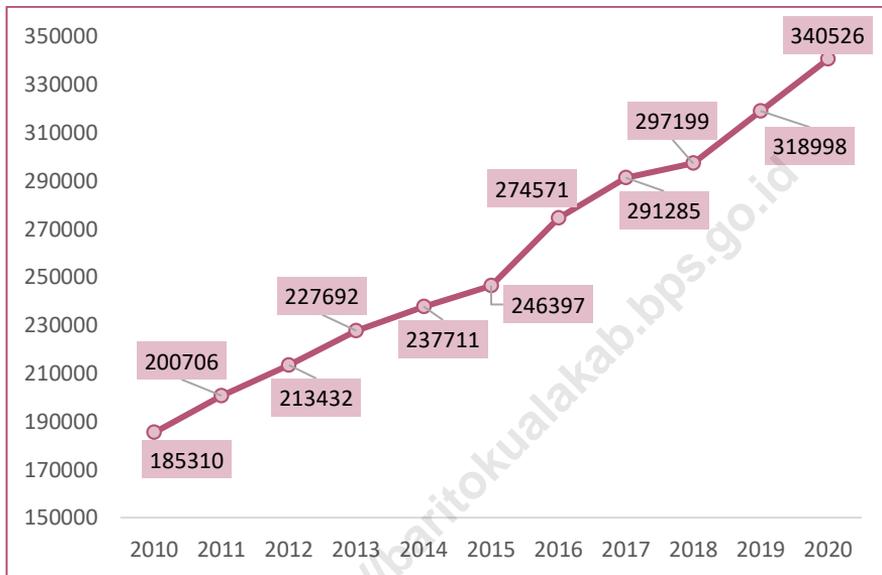
Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar yang diukur dari tingkat konsumsi atau pengeluaran, ada 3 ukuran kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- *Head Count Index*(HCl- P_0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Garis Kemiskinan

Penghitungan penduduk miskin tidak terlepas dari garis kemiskinan yang ditetapkan. Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah

garis kemiskinan. Penentuan besaran garis kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Besaran garis kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala secara tren mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2010 sampai tahun 2020 seperti yang terlihat pada grafik berikut.



Sumber: Hasil Olah Susenas, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 7.2 Garis Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala, 2010-2020

Pada tahun 2020, garis kemiskinan per kapita di Kabupaten Barito Kuala sebesar 340.526 rupiah. Hal ini berarti bahwa penduduk yang pengeluaran untuk konsumsinya per bulan kurang dari Rp. 340.526 dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan garis kemiskinan yang diperoleh sebelumnya, persentase penduduk miskin dapat diperoleh. Secara umum, sejak tahun 2010 perkembangan persentase penduduk miskin di Barito Kuala mengalami penurunan, meskipun pada beberapa tahun tertentu mengalami kenaikan.

Pada tahun 2010, tercatat bahwa terdapat 5,72 persen penduduk miskin di Barito Kuala. Selama dua tahun berikutnya, proporsi penduduk miskin menurun hingga 5,12 persen dan bertahan dengan nilai yang sama di tahun 2013. Akan tetapi, pada tahun 2014 dan 2015, nilai persentasenya sedikit meningkat menjadi 5,19 dan 5,22 persen. Setelah itu, penurunan yang cukup signifikan terjadi sampai tahun 2019 yang dapat mencapai 4,51 persen.



Sumber: Hasil Susenas BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 7.3 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 s.d. 2020

Pada tahun 2020, karena adanya pandemi, masyarakat mengalami kesulitan secara ekonomi, sehingga proporsi penduduk miskin kembali meningkat menjadi 5,11 persen. Kenaikan angka kemiskinan sejalan dengan kenaikan garis kemiskinan di Barito Kuala. Program pemerintah yang berfokus pada pengeluaran konsumsi masyarakat diharapkan terus dilanjutkan untuk mengurangi angka kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.



Sumber: Hasil Susenas Kabupaten Barito Kuala

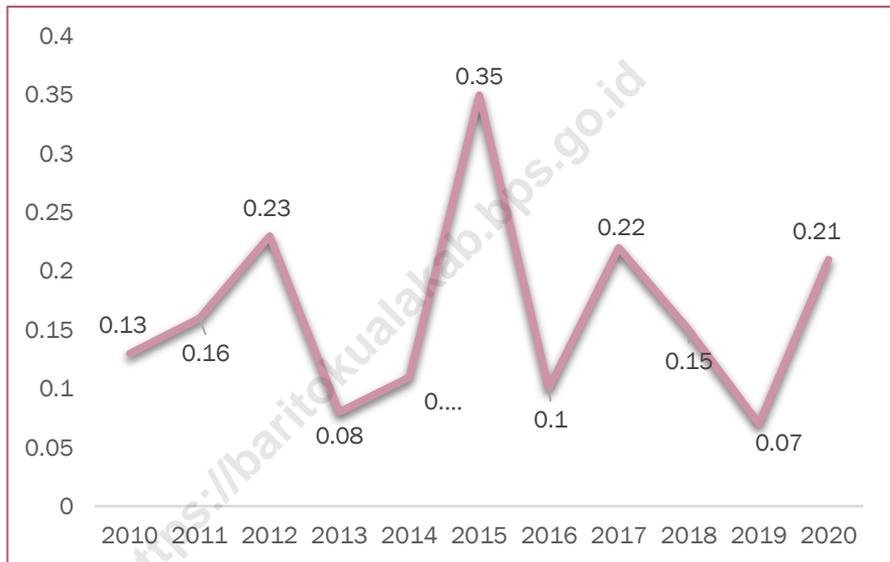
Gambar 7.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 s.d. 2020

Pada tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,81. Perubahan angka indeks ini cukup fluktuatif. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019, angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,41 poin. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010, dalam kurun waktu 10 tahun, terjadi penurunan angka indeks kedalaman kemiskinan dari 0,61 menjadi 0,44 di tahun 2019. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Akan tetapi, karena adanya situasi sulit di tengah pandemi, nilai kedalaman kemiskinan kembali meningkat di tahun

2020. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Sumber: Hasil Susenas Kabupaten Barito Kuala

Gambar 7.5 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 s.d. 2020

Indeks Keparahan Kemiskinan Barito Kuala pada tahun 2020 sebesar 0,21. Hal ini menggambarkan bahwa masih ada ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Barito Kuala. Walaupun perubahan angka indeks ini cukup fluktuatif, tetapi secara keseluruhan menunjukkan tren menurun yang berarti bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin dari tahun ke tahun semakin rendah, seperti yang terlihat pada Gambar 7.5 diatas.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO KUALA**

Jl. Jenderal Sudirman No. 72, Marabahan 70513
Telp. (0511) 4799057, e-mail: bps6304@bps.go.id
Website: baritokualakab.bps.go.id

ISSN 2776-8376



9

772776

837005